

**APLIKASI *SOFT BALANCING* AUSTRALIA SEBAGAI UPAYA
MENGIMBANGI PENGARUH TIONGKOK DI PAPUA NUGINI PADA
TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

WA ODE SITI RAHMAWATI PURNAMA

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2019

**APLIKASI *SOFT BALANCING* AUSTRALIA SEBAGAI UPAYA
MENGIMBANGI PENGARUH TIONGKOK DI PAPUA NUGINI PADA
TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

WA ODE SITI RAHMAWATI PURNAMA

15323087

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN
APLIKASI *SOFT BALANCING* AUSTRALIA SEBAGAI UPAYA
MENGIMBANGI PENGARUH TIONGKOK DI PAPUA NUGINI PADA
TAHUN 2015-2019

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Derajat S1 Hubungan Internasional


Pada tanggal

19 SEP 2019

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi


Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S.

Dewan Penguji

1. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A
2. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A
3. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A

Tanda Tangan





HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wa Ode Siti Rahmawati Purnama
No. Mahasiswa : 15323087
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Aplikasi *Soft Balancing* Australia sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 September 2019



Wa Ode Siti Rahmawati Purnama

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi rabbil'alaamin

Atas segala Ridho Allah, tulisan ini saya persembahkan kepada:

Mama dan Bapak

Terima kasih atas segala do'a dan kasih sayang yang diberikan disegala kondisi

Terima kasih Mama dan Bapak sudah menjadi panutan saya untuk terus berusaha

sampai titik ini

HALAMAN MOTTO

*Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal
lagi terus menerus mengurus makhluk- Nya*

(Surah Ali'Imran Ayat 2)

*Anakku, jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kamu harus
sanggup menahan perihnya kebodihan*

(Imam Syafi'i)

Karena hidup bukan untuk skripsi doang

(Anonim)

Satu hari menunda skripsi, satu hari menunda wisuda

(Anonim)

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih atas segala ridho yang telah diberikan kepada penulis sehingga mendapatkan petunjuk menyelesaikan skripsi ini dengan semestinya. Sholawat dan salam tak lupa pula turunkan kepada Nabi Muhammad *shallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul "*Aplikasi Soft Balancing Australia sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019*" terwujud karena dorongan, bimbingan, bantuan dan do'a yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada

1. Kedua orang tua terkasih, Mama Aswati, S.Pd dan Bapak Drs. La Ode Adili, M.Si. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini
2. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Atas teguran, wejangan dan ilmu yang diajarkan sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih menghargai waktu, kritis akan teori realisme dan bahagia selama berada di kelas bapak.

4. Bapak Geradi Yudistira S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan petunjuk, ide segar dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu dan pelajaran dalam segala hal yang telah diberikan.
6. Kakak La Ode Yusuf Dagri Madupa, S.T, yang selalu memberikan perlindungan ketika dalam kesulitan di tanah rantau.
7. Teman teman ku, Vioni Elma Putri, Al Fitra Wahyu Risandhi, Hanifa Syafitri dan Yuda Dwi Putera terima kasih sudah menghiasi masa-masa kuliah ku, semoga kalian selalu diberikan wahyu untuk terus berkarya.
8. *My Tough partners UII's official delegates for LIMUN 2019* Ramadha Trivanessa Isabelle Valentine, Krisal Putra, Ardya Syafhana. Terima kasih untuk kalian para diplomat masa depan, sudah sama-sama berjuang mencapai salah satu mimpi untuk pergi ke kota Impian London,UK.
9. *My coaches for LIMUN 2019*, Idznila dan Abi, terima kasih sudah mengajarkan cara berpidato selama 1.5 menit.
10. Teman teman KKN ku, *kauman familiy* (raras, nia, ana, sayyidah, basis, imamun dan jodang), terima kasih sudah menghiasi hari kkn selama satu bulan di desa Kauman, Kabupaten Kebumen.
11. Teman teman intelek ku, Muhammad Ibtihaj Han, Tri Inov Haripa dan Geraldi Talehata. Terima kasih sudah berbagi pengetahuan denganku, semoga kita selalu berbagi pengetahuan untuk masa depan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Signifikansi Penelitian	6
1.5 Cakupan Penelitian	9
1.6 Kajian Pustaka	9
1.7 Landasan Konsep	15
1.8 Metode Penelitian	19
1.8.1 Jenis Penelitian.....	19
1.8.2 Subyek Penelitian.....	22
1.8.3 Alat Pengumpulan Data	23

1.8.4 Tahap tahap Proses Penelitian.....	24
--	----

BAB II ANCAMAN TIONGKOK DI PAPUA NUGINI TERHADAP

AUSTRALIA 25

2.1 Identifikasi Kepentingan Australia di Papua Nugini	25
--	----

2.1.1. Identifikasi Kepentingan Australia di Papua Nugini dari Segi Kepentingan Keamanan dan Militer	25
---	----

2.1.2. Identifikasi Kepentingan Australia di Papua Nugini dari Segi Hubungan Ekonomi	29
---	----

2.2 Identifikasi Ancaman Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini terhadap Australia	35
--	----

2.2.1 Identifikasi Ancaman Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini terhadap Australia dari Segi Keamanan dan Militer	35
---	----

2.2.2 Identifikasi Ancaman Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini terhadap Australia dari Segi Ekonomi.....	37
---	----

2.2.3 Identifikasi Ancaman Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini terhadap Australia dari Segi Kepentingan Lainnya.....	40
---	----

BAB III APLIKASI *SOFT BALANCING* AUSTRALIA SEBAGAI UPAYA MENGIMBANGI PENGARUH TIONGKOK DI PAPUA NUGINI PADA

TAHUN 2015-2019..... 42

3.1 Aplikasi <i>Territorial Denial</i> Australia sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini	42
---	----

3.2	Aplikasi <i>Entangling Diplomacy</i> sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini	44
3.3	Aplikasi <i>Economic Strengthening</i> sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini	46
3.3.1	<i>Seasonal Workers Program</i> sebagai <i>Economic Strengthening</i> Australia dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini	47
3.3.2	Kerjasama Sistem Kabel Laut Koral sebagai <i>Economic Strengthening</i> Australia dalam mengimbangi Huawei di Papua Nugini	50
3.3.3	Upaya Ekspor, Impor dan Investasi sebagai bagian dari <i>Economic Strengthening</i> dalam upaya mengimbangi Pengaruh Perdagangan dan Investasi Tiongkok di Papua Nugini.....	54
3.3.4	Kerjasama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik sebagai <i>Economic Strengthening</i> Australia dalam mengimbangi Pengaruh Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini.....	55
3.4	Aplikasi <i>Signals of Resolve to Balance</i> sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini	59
3.4.1	Inisiasi Bersama Lombok sebagai <i>Signals of Resolve to Balance</i> Australia dalam Mengimbangi Kerjasama Militer antara Tiongkok dan Papua Nugini	60
BAB IV PENUTUP		63
4.1.	Kesimpulan	63
4.2.	Saran dan Rekomendasi	68

DAFTAR PUSTAKA 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Utama Impor Papua Nugini 2015-2018.....	30
Tabel 2. 2 Destinasi Ekspor Papua Nugini 2015-2018	32
Tabel 2. 3 Bantuan Luar Negeri Australia kepada Papua Nugini tahun 2015-2018...	34
Tabel 2. 4 Proyek Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini dari tahun 2015-2018	38
Tabel 3. 1 Partisipasi Papua Nugini adalan Seasonal Workers Program dari tahun 2012-2016	50
Tabel 3. 2 Jangka Waktu Pembangunan Sistem Kabel Laut Koral	52
Tabel 3. 3 Proyek Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini dari tahun 2015-2018	55
Tabel 3. 4 Jangka waktu dan kegiatan dari kerjasama trilateral Australia, Jepang dan AS di Papua Nugini.....	59

DAFTAR SINGKATAN

ADF	: <i>Australian Defense Force</i>
AIFFP	: <i>Australian Infrastructure Financing Facility for The Pacific</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
EFIC	: <i>Export Finance and Insurance Corporation</i>
IBSA	: <i>The India-Brazil-South Africa Dialogue Forum</i>
JBIC	: <i>The Japan Bank for International Cooperation</i>
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NA	: <i>Not Applicable</i>
ODA	: <i>Official Development Assistance</i>
OPIC	: <i>The U.S. Overseas Private Investment Corporation</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PIF	: <i>Pacific Island Forum</i>
PM	: Perdana Menteri
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on The Law Of The Sea</i>
Tpbs	: Tera Bitu Per Detik

ABSTRAK

Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini dikhawatirkan dapat menentang posisi Australia sebagai *hegemonic power* di Papua Nugini. Pengaruh Tiongkok terdiri dari kerjasama dari segi keamanan dan militer, bantuan luar negeri, ekonomi dan politik. Akumulasi dari pengaruh tersebut direspon dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia. Setiap kebijakan yang dikeluarkan Australia kemudian dijelaskan berdasarkan konsep *soft balancing* oleh Robert A Pape. *Soft balancing* adalah konsep yang menjelaskan bagaimana suatu negara mengimbangi negara lain dengan cara mengimbangi negara musuh, superior atau negara yang menentang tanpa menggunakan kekerasan. *Soft balancing* terdiri dari dengan empat indikator yakni penolakan akses teritorial terhadap negara superior atau disebut dengan *territorial denial*, penyertaan diplomasi atau disebut *entangling diplomacy* yakni manuver diplomatik menggunakan norma institusi internasional, penguatan ekonomi atau disebut *economic strengthening* dengan cara membuat blok perdagangan tanpa negara rival dan sinyal tekad menyeimbangkan atau disebut *signal of resolve to balance* yakni melakukan tindakan kolektif bersama negara *second-ranked powers* untuk menjaga komitmen dalam rangka perimbangan negara superior. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis bagaimana Australia mengaplikasikan empat indikator *soft balancing* untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok Di Papua Nugini dengan rentang waktu sepanjang 2015-2019.

Kata Kunci: Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini, Posisi Australia, *Soft Balancing*.

ABSTRACT

Tiongkok influence in Papua New Guinea could be challenged Australia's position as hegemonic power in Papua New Guinea. Tiongkok influence consists of cooperation in security and military, foreign aid, economic and politic. Accumulation from those influence responded by Australian's Policies. Every Australian's Policies can be explained based on soft balancing concept by Robert A Pape. Soft Balancing consists of four indicators such as territorial denial as refusal of territorial access to superior state, entangling diplomacy as diplomatic manuver with utilization of international institution norm, economic strengthening as create a trading bloc for increasing economy exclude non members or trade away from superior state and signal of resolve to balance as act collectively with second-ranked powers by keep the commitment for balancing superior state. Therefore this research conduct of analysis how Australia applying four indicators of soft balancing to balance Tiongkok influence in Papua New Guinea with specialization of Tiongkok Influence on 2015-2019.

Key Word: Tiongkok Influence in Papua New Guinea, Australia Position, Soft Balancing.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Australia dijuluki sebagai *hegemonic power* di kawasan Pasifik (Berteau, Green, & Cooper, 2014). Berbagai pengaruh telah Australia berikan kepada Pasifik termasuk Papua Nugini. Jika ditinjau dari segi geografis, Australia berdekatan dengan Papua Nugini. Papua Nugini memiliki posisi yang strategis yang dapat menguntungkan Australia. Posisi tersebut baik dari segi laut dan udara dapat menghubungkan perdagangan vital dan mitra pertahanan yang ada di Amerika Utara dan Asia Timur Laut (Wallis, 2014, p. 161)

Dari segi pertahanan, Papua Nugini adalah sebuah wilayah yang penting bagi keamanan Australia. Wilayah terdekat dapat dijadikan sebagai pangkalan oleh penguasa asing untuk menyerang Australia sebagaimana pengalaman Australia pada Perang Dunia Kedua (Brown, 2012, p. 5)

Sehingga untuk mengoptimalkan kepentingan keamanan Australia, maka melalui Buku Putih Keamanan Australia yang dikeluarkan pada tahun 2016 menjelaskan tujuan Australia selain mempertahankan keamanan dalam negeri, Australia memiliki capaian yakni “kawasan terdekat yang aman meliputi Asia Tenggara dan Pasifik Selatan” (Australian Government:Defence White Paper, 2016, p. 17). Keunikan dalam capaian ini, Papua Nugini disebutkan secara eksplisit dimana Australia berupaya menjadikan Papua Nugini sebagai mitra utama dalam bidang

keamanan di kawasan. Sebagaimana penulis kutip dari Buku Putih Keamanan Australia tersebut bahwa (Australian Government: Defence White Paper, 2016, p. 17)

“...Australia will continue to seek to be the principal security partner for Papua New Guinea, Timor-Leste and Pacific Island Countries in the South Pacific”

Dari segi bantuan luar negeri dan investasi, Australia adalah pemberi bantuan luar negeri terbesar untuk Papua Nugini dalam skala kawasan Pasifik. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh *Lowy Institute* (2018), sejak tahun 2015 hingga 2016 total bantuan yang diberikan sebesar USD 821,99 juta (Lowy Institute, 2018) dan 2017-2018 sebesar \$ 471,8 juta (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2018)

Namun, kehadiran Tiongkok di Papua Nugini semakin lama semakin masif sehingga pengaruh Australia berkurang di Papua Nugini. Hal ini didukung oleh Teori Ancaman Tiongkok atau *China Threat Theory*. Teori Ancaman Tiongkok memiliki banyak definisi, berupa ancaman militer Tiongkok, ancaman ekonomi, ancaman ras, ancaman peradaban, ancaman makanan, ancaman lingkungan, ancaman populasi dan lain lain (Ai, 2016, p. 453). Lain halnya dengan Hill (2010) menjuluki Tiongkok sebagai *China Threat* dan *China Syndrome*. *China Threat* atau Ancaman Tiongkok bagi Australia adalah sebuah permainan *zero-sum*, diakumulasi dengan kebijakan pendekatan konflik dan negara-negara Pasifik dijadikan sebagai “papan catur” geopolitik antara Tiongkok dan Australia (Hill M. , 2010, pp. 41-42).

Ada tiga asumsi yang mendukung Australia memandang Tiongkok sebagai *China Syndrome*. Pertama adalah ketegangan antara kepentingan Tiongkok di Pasifik

dan usaha mempertahankan kepentingan Australia di Pasifik sebagai kekuatan *western-order* sehingga aktor-aktor tersebut terlibat dalam kondisi kompetisi untuk memiliki pengaruh di kawasan Pasifik.

Kedua, bantuan Tiongkok yang bersifat” *no string attached*” dianggap mengancam upaya negara pemain yang dominan di kawasan Pasifik yakni Selandia Baru dan Australia yang telah memperkuat pengaruh politik dan ekonominya di kawasan Pasifik. Ketiga, perbedaan skala kekuatan antara *external power* dan negara-negara Pasifik sehingga menyebabkan kawasan tersebut sebagai objek strategis bukan aktor yang memiliki suaranya sendiri (Hill M. , 2010, pp. 42-43).

Berdasarkan Teori Ancaman Tiongkok tersebutm Australia kini kehilangan pengaruhnya di Papua Nugini karena adanya ancaman dari Tiongkok. Tiongkok sebagai salah satu pemain di Papua Nugini yang mengekspresikan hubungan dengan Papua Nugini melalui rekan bantuan luar negeri, perdagangan, investor asing untuk infrastruktur dan sumber pinjaman untuk bisnis kecil dan menengah (Jones, 2017).

Dari segi bantuan luar negeri, total bantuan yang dihabiskan Tiongkok untuk Papua Nugini pada tahun 2015-2018 sebesar USD 139.30 juta (Lowy Institute, 2018). Papua Nugini juga adalah negara penerima donor terbanyak dari Tiongkok dibandingkan negara di kawasan Pasifik lainnya (Lowy Institute, 2018). Secara keseluruhan, bantuannya ada pada sektor agrikultur, pertanian dan kehutanan, komunikasi, pendidikan, pemerintah dan masyarakat sipil, kesehatan, bantuan kemanusiaan, industri, pertambangan dan konstruksi, infrastruktur dan pelayanan dan transportasi. Namun, Total Bantuan Luar Negeri Tiongkok berada pada sektor

transportasi 28%, pendidikan 18% dan industri, pertambangan dan konstruksi sebesar 16% (Brant, 2015).

Dari segi politik, Tiongkok mampu mengupayakan kepentingannya. Salah satu contoh adalah Tiongkok melakukan tekanan publik agar Pemerintah Papua Nugini dan pemerintah lain di kawasan Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa kunjungan PM Peter O'Neill di Tiongkok pada tanggal 5-10 Juli 2016. Diplomat Tiongkok melakukan tekanan kepada negara Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Jones, 2017). Sehingga berdasarkan hasil pertemuan bilateral antar kedua negara menghasilkan pers bersama bahwa Papua Nugini menghargai dan mendukung Tiongkok dalam isu Laut Tiongkok Selatan dengan cara mendukung Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai bersama para pihak langsung melalui konsultasi dan negosiasi sesuai dengan hukum internasional (Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016).

Atas dasar Tiongkok yang semakin berpengaruh di Papua Nugini, Australia perlu untuk menanggapi. Pernyataan dari sekretaris Parlemen Australia untuk Kepulauan Pasifik, Richard Marles menyatakan bahwa kehadiran Tiongkok disambut baik oleh Australia (Marles, 2014). Namun disatu sisi, Australia perlu untuk melakukan upaya perimbangan (*rebalance*) terhadap pengaruh Tiongkok di Kepulauan Pasifik (Hegarty, 2015, p. 3).

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Australia menanggapi Tiongkok di Kepulauan Pasifik khususnya Papua Nugini dengan menggunakan konsep *soft*

balancing. *Soft balancing* adalah upaya untuk mengimbangi negara musuh atau negara yang berpotensi musuh dengan menggunakan metode non koersif dan didorong oleh kombinasi kepentingan ekonomi, isu keamanan dan kepentingan domestik (Brooks & Wohlforth, 2005, p. 74; Oswald, 2006, p. 147).

Salah satu contoh *soft balancing* Australia dalam hal menanggapi Pengaruh Tiongkok adalah tergantung pada kondisi hubungan AS (AS) dan Tiongkok. Australia melakukan perimbangan dengan tetap menekankan hubungan dengan AS dan mengembangkan hubungan dengan kekuatan regional lainnya, seperti Jepang, Indonesia dan India. Selain itu, Australia bergerak untuk mengimbangi Tiongkok dengan turut serta dalam bentuk kerjasama ekonomi regional baik itu *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) dan KTT Asia Timur (McDougall, 2011, p. 15).

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai empat hal. Pertama, mengidentifikasi kepentingan Australia di Papua Nugini. Kedua, mengidentifikasi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam kepentingan Australia. Ketiga, mengaplikasikan konsep *soft balancing* oleh Robert A Pape sebagai cara untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Australia dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan satu rumusan masalah: Bagaimana Australia mengaplikasikan *soft balancing* Australia sebagai upaya mengimbangi Pengaruh Tiongkok Papua Nugini tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- i. Untuk mengidentifikasi kepentingan Australia di Papua Nugini
- ii. Untuk mengidentifikasi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam kepentingan Australia
- iii. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana Australia mengaplikasikan *soft balancing* sebagai upaya untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena banyak pembahasan baik dari pihak pemerintah, media, akademisi dan lembaga *think thank* yang meneliti tentang dinamika kebijakan Australia dalam menanggapi Pengaruh Tiongkok di Kawasan Pasifik. Di pihak lain, Pengaruh Tiongkok masih dianggap bukan sebagai ancaman bagi Australia karena Tiongkok sampai saat ini belum menunjukkan ciri-ciri yang akan mengancam secara langsung kepada Australia. Bahkan eksistensi Tiongkok di Kawasan Pasifik turut membantu perkembangan Kawasan Pasifik itu sendiri. Berdasarkan rekomendasi dari *Australian Strategic Policy Institute* bahwa jangan terlibat untuk menyalahkan siapapun atas kehilangan Pasifik ke Tiongkok (Herr, 2019, p. 32). Hal ini disebabkan oleh beberapa argumen sentral menyatakan bahwa Australia juga tidak memberikan prioritasnya ke Pasifik sehingga Tiongkok memiliki kesempatan untuk menempati posisi di Pasifik (O'Dowd, 2018). Salah satunya dengan memberikan bantuan baik berupa pinjaman yang dikenal sebagai *no string*

attached kepada mitra Pasifiknya yakni Papua Nugini sehingga memberikan kelonggaran bagi penerima untuk menggunakan dana tersebut (Doherty, 2018).

Namun disisi lain, pengaruh Tiongkok memunculkan pengaruh yang mengancam pemain *hegemonic power* termasuk Australia di Kawasan Pasifik. Karena perkembangan dan pertumbuhan Tiongkok di Asia Pasifik yang begitu masif disertai dengan ketegasan Tiongkok dalam sengketa regional (Berteau, Green, & Cooper, 2014, p. 1), maka keberadaan Tiongkok perlu untuk diperhatikan lebih lanjut. Seperti pernyataan tertulis di Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 2017 menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indo-Pasifik meningkat karena globalisasi. Aktor aktor yang terlibat didalamnya kini berubah, mulai dari AS sebagai penguasa yang dominan, kini Tiongkok hadir menentang kekuasaan AS (Australian Government, 2017, p. 1).

Untuk meningkatkan pengaruh di Indo-Pasifik, Australia meningkatkan hubungan dengan AS sebagai aliansi utamanya. Cara meningkatkan pengaruhnya di Kawasan Indo-Pasifik adalah dengan mendukung upaya perimbangan (*balance*) di Kawasan Indo-Pasifik dengan mempromosikan kawasan yang terbuka, inklusif dan kawasan berlandaskan hukum (Australian Government, 2017, pp. 1-4). Kemudian pernyataan PM Malcolm Turnbull pada saat peluncuran Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 2017 menyatakan bahwa” *this is the first time in our history that our dominant trading partner isn't also our dominant security partner. We must see this an opportunity not as a risk*” (Collinson, 2017, p. 1) yang artinya adalah fakta bahwa mitra dagang Australia kini bukan termasuk mitra keamanan Australia. Sebagaimana

penulis tinjau adalah Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Australia dari segi ekspor dan impor (Holmes, 2013) sehingga Tiongkok menjadi aktor potensial yang dimaksud oleh pernyataan Malcolm Turnbull tersebut.

Dari pihak akademisi, Tulisan dari Rory Medcalf (2018) yang berjudul *Australia's Foreign White Paper Navigating in the Indo-Pacific* dapat menjadikan bukti bahwa Australia tidak memiliki posisi yang baik akan Pengaruh Tiongkok. Memang didalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 2017 tidak menyebutkan Tiongkok sebagai musuh, namun karena ketidakpastian AS dibawah kepresidenan Donald Trump dan Pengaruh Tiongkok membuat Australia perlu untuk memikirkan strategi lain untuk memperoleh keuntungan bekerjasama dengan Tiongkok dengan tantangan akan menimbulkan perbedaan nilai bahkan berpotensi melawan kepentingan Australia (Medcalf, 2018, p. 33).

Pada penelitian ini akan menjadi penelitian baru karena penelitian ini akan membahas bagaimana Australia mengaplikasikan *soft balancing* sebagai upaya mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019. Tulisan ini bersifat baru karena beberapa penulis lain belum meneliti secara komprehensif sesuai dengan indikator *soft balancing* oleh Robert A Pape yakni *territorial denial* (penolakan teritorial), *economic strengthening* (penguatan ekonomi), *entangling diplomacy* (melibatkan diplomasi) dan *signals of resolve to balance* (tekad untuk mengimbangi) dalam rangka untuk mengimbangi Tiongkok di Papua Nugini. Kemudian penelitian ini menjadi pelengkap bagi penelitian sebelumnya. Sebagaimana yang telah dituliskan oleh (Hegarty, 2015) yang membahas hanya salah

satu indikator *soft balancing* yakni *economic strengthening*. Dalam tulisan tersebut menjelaskan tentang Australia mengimbangi Pengaruh Tiongkok dengan cara *economic strengthening* bersama negara-negara Pasifik melalui program *Seasonal Workers Program*. *Seasonal Workers Program* adalah program untuk menyuplai tenaga kerja negara-negara Pasifik ke Australia dibidang industri holkultural (Hegarty, 2015, p. 10).

1.5 Cakupan Penelitian

Lingkup tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara yaitu Australia. Pembahasan akan dibatasi dengan mengambil sisi Australia dalam upaya mengaplikasikan *soft balancing* untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015 hingga 2019.

Lingkup waktu diambil pada penelitian ini berkisar pada tahun 2015 sampai pada tahun 2019. Lingkup waktu ini diambil karena untuk menyelaraskan penelitian sesuai dengan satu rezim pemerintahan yang dipegang oleh partai liberal yakni PM Malcolm Turnbull (15 September 2015- 23 Agustus 2018) dan PM Scott Morrison (24 Agustus 2018-2019).

1.6 Kajian Pustaka

Terdapat perkembangan definisi dari *soft balancing*. *Soft balancing* melingkupi sebuah aliansi tertutup dengan mengembangkan perjanjian atau pemahaman tentang keamanan untuk mengimbangi negara musuh atau negara yang berpotensi macam atau negara *rising power* (Brooks & Wohlforth, 2005, p. 74; Oswald,

2006, p. 147). *Soft balancing* juga didasarkan pada penumpukan senjata yang tertutup atau terbatas, kerjasama pelatihan militer sementara dan kolaborasi regional atau internasional (Paul, Wirtz, & Fortman, 2004, p. 3).

Beberapa penulis menyatakan bahwa negara musuh atau negara yang mengancam adalah AS karena kekuasaannya yang besar terutama paska perang dunia kedua. Beberapa penulis tersebut berpendapat bahwa *soft balancing* adalah upaya yang disengaja untuk menantang, menahan atau menggagalkan kekuasaan negara kuat dalam hal ini AS (Lieber & Alexander, 2005, p. 109; Pape, 2005, p. 8; Corrales & Penfold, 2015, p. 100).

He & Feng (2008) menjelaskan perbedaan dari *hard balancing* dan *soft balancing*. *Hard balancing* adalah sikap untuk meningkatkan kapabilitas negara untuk melawan negara musuh dalam rangka mencapai keamanan. Hal ini juga serupa dengan pengertian strategi *balancing* bahwa mengarah pada sikap negara untuk memiliki kapabilitas yang lebih baik daripada negara lain atau melakukan koalisi dengan beberapa negara dalam rangka memperoleh aset kekuasaan yang lebih besar (Art, Brooks, Wohlfort, Lieber, & Alexander, 2006, pp. 183-184).

Pembentukan koalisi adalah sebagai upaya untuk mengumpulkan kekuatan untuk melawan *negara powerful* atau *rising power*. Pendapat Hurrel (2000) bahwa negara menengah berusaha menggunakan institusi internasional untuk mempertahankan diri terhadap norma atau aturan yang mempengaruhi kepentingan mereka atau jika memungkinkan dapat mengubah norma internasional yang dominan sesuai dengan keinginan mereka (Hurrel, 2000, p. 4). Contoh yang sesuai adalah

Pembentukan IBSA *Dialogue Forum* yang digagas oleh India, Brazil dan Afrika Selatan sebagai wadah untuk menentang legitimasi order internasional karena organisasi ekonomi internasional saat ini belum melayani kepentingan negara miskin (Flames, 2007, p. 17).

Ada perbedaan mengenai definisi *soft balancing*. Pertama, *soft balancing* hadir untuk melawan kekuasaan AS (Pape, 2005, p. 8; Paul T. , 2005, p. 58). Kedua adalah tidak ada perilaku *balance* baik itu *hard* dan *soft balancing* secara umum dan juga perilaku demikian tidak dipengaruhi oleh unilateralisme AS (Art, Brooks, Wohlfort, Lieber, & Alexander, 2006, pp. 183-184). Dari kedua pendapat tersebut, *soft balancing* tidak hanya fokus melawan AS, tetapi intinya *soft balancing* harus didorong oleh kombinasi kepentingan ekonomi, isu keamanan dan kepentingan domestik dalam mengimbangi negara yang rival atau berpotensi menjadi musuh (Brooks & Wohlforth, 2005, p. 74; Oswald, 2006, p. 147).

Untuk memahami lebih lanjut mengenai *soft balancing*, He dan Feng (2008) menjelaskan perbedaan antara *hard* dan *soft balancing*. Contoh *hard balancing* adalah perlombaan senjata, mobilisasi militer, aliansi militer formal, transfer teknologi ke negara aliansi atau bantuan ekonomi kepada negara aliansi. *Soft balancing* adalah mengurangi kapabilitas kekuasaan negara musuh untuk memperoleh keamanan. Contohnya adalah menjual senjata ke negara rival musuh, negosiasi *arms control*, pemberian sanksi ekonomi, embargo dan *strategic non cooperation* (He & Feng, 2008, p. 373).

He dan Feng (2008) juga menuliskan bahwa *soft balancing* adalah sikap mengimbangi negara musuh atau negara yang berpotensi mengancam dengan cara kerjasama bilateral dan multilateral (He & Feng, 2008, p. 363). Pendapat yang sama juga dituliskan oleh Robert A Pape akan tetap dengan istilah yang berbeda yakni *entangling diplomacy* dan *economic strengthening* (Pape, 2005, p. 37). Argumen yang sama dijelaskan oleh penulis lain bahwa *soft balancing* sebagai upaya untuk melakukan kolaborasi diplomatis dengan negara lain dalam rangka mengimbangi aktor rival, musuh atau negara *rising power* (McDougall, 2014, pp. 330-331; Paul T. , 2005, p. 58).

Soft balancing dengan melakukan kerjasama diplomatik telah dilakukan oleh Tiongkok. Di dalam tulisan Marc Lanteigne (2012), ia menjabarkan tentang *soft balancing* Tiongkok di Kawasan Pasifik. Alasan Tiongkok melakukan *soft balancing* adalah adanya pengaruh AS, Australia dan Selandia Baru yang kuat di wilayah tersebut. Dengan demikian, pada tahun 2006, Tiongkok turut aktif melakukan kerjasama multilateral melalui konferensi tingkat tinggi PIF bahkan dalam kesempatan tersebut, Tiongkok mengumumkan akan memberikan bantuan pinjaman kepada negara anggota PIF sebesar US\$375 juta (Lanteigne, 2012, p. 35).

Contoh lain *soft balancing* adalah kasus Australia melakukan *soft balancing* terhadap Pengaruh Tiongkok. Bentuk *soft balancing* dalam hal menanggapi Pengaruh Tiongkok adalah masih berkaitan dengan bagaimana kondisi hubungan antara AS ke Tiongkok, maka Australia melakukan perimbangan dengan tetap menekankan hubungan dengan AS, dan pengembangan dengan kekuatan regional lainnya, seperti

Jepang, Indonesia, dan India. Selain itu, Australia bergerak untuk menyeimbangkan Tiongkok dengan turut serta dalam bentuk kerjasama ekonomi regional baik itu APEC, ASEAN dan KTT Asia Timur (McDougall, 2011, p. 15).

Soft balancing juga dapat dilakukan dengan cara melibatkan diplomasi melalui perundingan multilateral dengan tujuan untuk menghalangi, menunda dan membatalkan suatu kebijakan negara yang agresif atau disebut *entangling diplomacy* (Pape, 2005, p. 36). Contohnya adalah Perancis dan Swedia menggunakan peraturan institusional dan prosedur PBB untuk menunda atau menghadang pelaksanaan kebijakan AS yang ingin melakukan perang dengan Irak. Umumnya, AS telah mendapatkan legitimasi kebijakan luar negeri dan militernya melalui persetujuan Dewan Keamanan PBB. Namun pada bulan September 2002, Perancis menolak resolusi AS yang ingin melakukan perang melawan Irak. Atas dasar keputusan Dewan Keamanan PBB, resolusi oleh AS tersebut ditunda. Resolusi tersebut terjadi jika Pertama, AS harus bersungguh sungguh menyelesaikan masalah dengan Irak dengan inspeksi senjata bersama. Kedua, perlu menunggu otorisasi resolusi perang sampai inspeksi selesai dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, Perancis berhasil menunda AS untuk melakukan perang melawan Irak setidaknya selama satu tahun ketika perang AS dengan Irak terjadi pada tahun 2003 (Pape, 2005, p. 39).

Selain melibatkan diplomasi, Pape (2005) juga menjelaskan upaya *soft balancing* adalah penolakan akses teritorial atau *territorial denial* (Pape, 2005, p. 36). Studi kasus *territorial denial* adalah Turki menolak upaya AS menggunakan wilayah

teritorial Turki sebagai tempat pementasan angkatan darat. AS meminta kepada Turki untuk mengizinkan penempatan 60.000-90.000 pasukan angkatan darat AS melalui Turki untuk menginvasi Irak. Turki menjawab pemerintah telah mengindikasikan kesiapannya untuk memenuhi permintaan AS di semua area, kecuali penempatan pasukan angkatan darat AS di Turki (Gordon, 2003).

Selain peristiwa dalam rangka *soft balancing* terhadap AS, Tiongkok menjadi *rising power* yang mengancam negara lain khususnya isu Laut Tiongkok Selatan. Pada bulan Januari 2013, Filipina melakukan tuntutan kepada Tiongkok melalui pengadilan hukum laut di Den Haag. Berdasarkan pasal XV UNCLOS, klaim Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok termasuk klaim Kepulauan Sparty and Paracel telah melanggar Hak Filipina. Pada tahun 2016, pengadilan setuju atas klaim Filipina dan menolak klaim Tiongkok dimana klaim sejarah Tiongkok tidak didukung oleh bukti (Paul T. V., 2018).

Dari sekian pendapat beberapa penulis diatas, ada beberapa indikator mengenai *soft balancing*. Pertama, *soft balancing* adalah upaya untuk menentang negara yang lebih besar untuk memperoleh keamanan (Paul, Wirtz, & Fortman, 2004, p. 3). Kedua adalah *soft balancing* terjadi jika adanya pertimbangan mengenai kepentingan ekonomi, keamanan dan politik domestik suatu negara (Brooks & Wohlforth, 2005, p. 74; Oswald, 2006, p. 147). Ketiga adalah mekanisme *soft balancing* yakni mengurangi kapabilitas kekuasaan negara musuh untuk memperoleh keamanan. Contohnya adalah menjual senjata ke negara rival musuh, negosiasi *arms control*,

pemberian sanksi ekonomi dan embargo dan *strategic non cooperation* (He & Feng, 2008, p. 373).

Keempat adalah selain mengurangi kapabilitas negara untuk memperoleh keamanan seperti gambaran He dan Feng (2008), *soft balancing* menawarkan *entangling diplomacy dan economic strengthening* (Pape, 2005, p. 36) dan membentuk koalisi untuk memperoleh aset yang lebih besar (Art, Brooks, Wohlfort, Lieber, & Alexander, 2006, pp. 183-184; Oswald, 2006, p. 147).

Namun, konsep *soft balancing* perlu untuk dikritisi lebih lanjut. Berdasarkan dinamika negara dalam menggunakan kebijakan *balancing*, ternyata tidak selamanya pelaku adalah negara yang lebih lemah dari negara musuh. Contohnya adalah citra *super power* AS melakukan upaya *rebalance* di kawasan Asia-Pasifik yang disebabkan oleh Pengaruh Tiongkok (Berteau, Green, & Cooper, 2014, p. 19). Salah satu upaya *rebalance* AS di Asia Pasifik adalah menguatkan hubungan dengan aliansi terkuat nya nya Australia, Jepang, Filipina dan Korea Selatan (Berteau, Green, & Cooper, 2014, p. 19).

1.7 Landasan Konsep

Soft Balancing

Menurut Pape (2005), setidaknya ada empat strategi sebuah negara dalam melakukan *soft balancing* yaitu (i) *territorial denial*, (ii) *entangling diplomacy*, (iii) *economic strengthening*, (iv) *signals of resolve to balance*. ***Territorial denial*** adalah upaya suatu negara untuk tidak memberikan akses teritorial kepada negara lain. Hal

ini untuk mengurangi aktivitas/pengaruh suatu negara terhadap negara lain. Indikator ini dilakukan ketika negara superior mendapatkan keuntungan akses teritorial dari pihak ketiga sebagai area pementasan angkatan udara dan transit angkatan laut dan udara. Melawan agar membatasi akses teritorial dapat mengurangi kemenangan negara superior dengan cara meningkatkan masalah logistik atau memaksanya untuk melawan hanya dengan kekuatan angkatan laut atau udara saja demi mengurangi perlawanan dengan kekuatan yang lengkap dari negara superior ke negara yang lemah.

Entangling diplomacy adalah melibatkan diplomasi dimana suatu negara menyeimbangkan negara lain dengan cara diplomasi melalui perundingan multilateral. Bahkan negara superior tidak mampu untuk menyangkal peraturan organisasi internasional untuk memenangkan proses diplomasi tanpa dukungan dari negara anggota yang penting. Dengan demikian, negara dapat menggunakan atau memanfaatkan peraturan dan prosedural organisasi internasional untuk menunda rencana perang negara superior atau mengurangi dampak tidak terduga dikemudian hari. Setidaknya proses ini digunakan untuk mengulur waktu agar negara dapat menyiapkan diri melawan negara superior bahkan proses menunda tersebut membuat isunya tidak relevan lagi. Singkatnya, kapabilitas seorang aktor melakukan diplomasi dapat menghambat atau mencegah negara lain melakukan tindakan sewenang wenang atau dapat mengurangi kerugian perang.

Economic strengthening adalah membangun suatu blok perdagangan dalam upaya mengimbangi kekuatan negara superior. Kekuatan militer yang kuat didukung

oleh ekonomi yang kuat. Negara superior tentunya memiliki kekuasaan besar baik dalam militer dan ekonomi. Untuk mengimbangnya, setidaknya untuk jangka panjang adalah meningkatkan ekonomi masing-masing. Caranya adalah dengan membangun sebuah blok perdagangan regional yang dapat meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi untuk para anggota blok tetapi dengan tidak menyertakan negara superior tersebut. Jika berhasil, maka secara keseluruhan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi negara superior.

Signals of resolve to balance adalah tekad yang kuat dengan melakukan tindakan kolektif bersama negara *second-ranked powers* untuk menjaga komitmen dalam rangka perimbangan negara superior. Jika negara berulang kali melakukan kerjasama, maka secara bertahap akan meningkatkan kepercayaan untuk mengimbangi negara superior terutama rencana ambisius negara superior. Hal ini dilakukan karena kapabilitas negara *second-ranked powers* lebih kecil dari pada negara superior, sehingga akan lebih baik negara *second-ranked powers* tidak sendirian mengimbangi negara superior (Pape, 2005, pp. 36-37).

Untuk indikator pertama yakni *territorial denial*, Australia perlu mengaplikasikan upaya penolakan akses teritorial Papua Nugini kepada Tiongkok. Namun sejauh ini belum ada upaya dalam meningkatkan masalah logistik atau melawan Tiongkok dengan menggunakan kekuatan angkatan laut atau darat yang ditujukan untuk melawan Tiongkok.

Lain halnya dengan indikator kedua, Australia bersama dengan AS dan Jepang mengaplikasikan *entangling diplomacy* yakni memanfaatkan 50th ASEAN *Ministrial*

Meeting untuk mendorong agar Tiongkok dan ASEAN menyelesaikan pembuatan *Code of Conduct for the South China Sea* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang mengikat secara hukum, efektif dan bersesuaian dengan hukum internasional (Gao, 2017). Upaya ini dilakukan karena Tiongkok melakukan tekanan publik kepada Papua Nugini mendukung posisi Tiongkok dalam Laut Tiongkok Selatan (Jones, 2017). Hasilnya adalah Papua Nugini kini mendukung posisi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016). Kondisi ini menghasilkan kondisi yang tidak bersesuaian dengan kepentingan Australia yakni kawasan Indo -Pasifik yang stabil termasuk kawasan Asia Utara, Laut Tiongkok Selatan dan Jalur komunikasi Laut di Samudera India dan Pasifik (Australian Government:Defence White Paper, 2016, pp. 17-18).

Australia juga mengaplikasikan indikator ketiga yakni *economic strengthening* dengan membuat sebuah program khusus dengan tidak mengikutsertakan Tiongkok di dalamnya yaitu *Seasonal Workers Program*. *Seasonal Workers Program* sebuah program bagi pengusaha dapat merekrut petani agrikultur yang berasal dari negara-negara Pasifik untuk bekerja di Australia (Australian Government: Department of Employment, Skills, Small and Family Business, 2019). Meskipun *Seasonal Workers Program* dibentuk pada tahun 2012, namun pada tahun 2015 hingga 2016 terlihat adanya peningkatan akan partisipasi Papua Nugini dalam *Seasonal Workers Program*. Partisipasi mulai dari 26 orang pada tahun 2012-2014 kemudian meningkat dengan total 35 orang pada tahun 2014-2015 dan 42 orang pada tahun 2015-2016 (Zhao, Binks, Kruger, Xia, & Steneke, 2018).

Menurut Hegarty (2015) Program ini muncul bukan dijadikan sebagai mengimbangi langsung atas Pengaruh Tiongkok. Namun dapat dijadikan sebagai upaya Australia mempererat hubungan dengan negara-negara Pasifik, meningkatkan keamanan regional dan pengaruh di Pasifik (Hegarty, 2015, p. 9).

Australia juga mengaplikasikan indikator keempat yakni *signals of resolve to balance*. Berdasarkan definisi *signals of resolve to balance* yang artinya adalah permainan koordinasi secara timbal balik bersama dengan negara lain maka aplikasinya adalah Australia adalah bekerjasama dengan AS dan Jepang dengan membentuk Kerjasama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik termasuk Papua Nugini (Export Finance Australia, 2019). Hal ini dilatarbelakangi oleh pengaruh Tiongkok yang ada pada segi Bantuan Luar Negeri Tiongkok. Bantuan untuk Papua Nugini berada pada sektor transportasi 28%, pendidikan 18% dan industri, pertambangan dan konstruksi 16% (Brant, 2015).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Menurut Bromley (1986), ada sepuluh langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan penelitian kualitatif. Langkah tersebut adalah (Bromley, 1986, p. 26)

- i. Menentukan rumusan masalah
- ii. Mengumpulkan informasi untuk memahami masalah penelitian, konsep dan teori

- iii. Menyarankan beberapa interpretasi atau jawaban penelitian atau pertanyaan sesuai dengan informasi awal yang telah ditemukan
- iv. Menggunakan interpretasi tersebut sebagai bukti yang akan mendukung atau kontradiksi dengan penelitian, ganti interpretasi atau jawaban jika perlu
- v. Melanjutkan untuk mencari bukti bukti lain. Menghilangkan interpretasi atau jawaban yang berlawanan dengan bukti yang telah ditemukan
- vi. Mengecek kembali kualitas dan sumber bukti untuk memastikan akurasi dan konsistensi
- vii. Berhati hati memeriksa logika dan validitas argumen yang mengarah ke kesimpulan
- viii. Memilih studi kasus terkuat untuk jika memiliki lebih dari satu kesimpulan
- ix. Jika memungkinkan, membuat rencana aksi penelitian
- x. Menyiapkan laporan penelitian.

Melakukan penelitian kualitatif membutuhkan data, konsep dan teori. Teori dapat di kembangkan ketika memiliki data yang cukup dan akurat yang diperoleh dari penelitian lapangan (Walliman, 2011, p. 131). Pada penelitian kali ini, penulis melakukan pemahaman dan pendeskripsian konsep *soft balancing* kemudian mengembangkan konsep tersebut melalui studi kasus.

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan sumber yang berasal dari data sekunder. Tipe data sekunder berbentuk turtulis, non tertulis dan data

survei yang berasal dari informasi statistik. Data tertulis dapat berbentuk catatan suatu organisasi atau instansi seperti laporan internal, laporan tahunan, catatan produksi, data personal, laporan divisi dan hasil pertemuannya termasuk komunikasi baik berupa email, surat, catatan kecil. Publikasi seperti buku, jurnal, surat kabar, salinan iklan dan publikasi pemerintah (Walliman, 2011, pp. 94-95).

Data non tertulis berupa program televisi, radio, rekaman, video, film, *live report*, wawancara, hasil seni dan historik artefak. Data survei berupa sensus penduduk tentang populasi, data ekonomi, survei penjualan, ramalan ekonomi dan sikap karyawan. Data survei biasanya dilakukan secara berkala dan terus menerus, sementara bahkan sekali saja yang terbatas pada sektor, waktu dan area (Walliman, 2011, p. 95).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari ketiga jenis tipe data sekunder tersebut. Contohnya adalah menggunakan fasilitas jurnal *Jstor* untuk mencari artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain portal jurnal, penelitian kali ini juga menggunakan sumber dari situs web resmi pemerintah Australia seperti *Australia Foreign Policy White Paper*, atau berita dan majalah seperti *BBC*, *The Australian*, *The Diplomat* dan lain lain. Selain itu penulis juga mengambil data dari laporan seperti CSIS dan ASPI.

Data non tertulis adalah mengambil data yang bersumber dari hasil wawancara yang tercantum dari platform video *Youtube* dan sejenisnya.

Kemudian untuk data survei, penelitian ini mengambil data survei yang dikeluarkan oleh *The Lowy Institute* dan *The Interpreter*.

Penulis menggunakan penelitian analisis retorik. Analisis retorik adalah analisis yang menggunakan bahasa dan pendapat untuk membujuk pendengar dan pembaca (Walliman, 2011, p. 141). Sehingga pada penelitian ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian untuk mempengaruhi bahwa Pengaruh Tiongkok merupakan musuh atau berpotensi menjadi musuh bagi Australia, setidaknya dalam jangka panjang. Penulis akan menuliskan argumen yang kemudian di dukung oleh bukti bukti yang bersumber dari data sekunder. Sebagaimana posisi Australia sebagai *hegemonic power* (McDoughall, 2007, p. 868), maka Australia perlu mempertahankan eksistensinya di Kepulauan Pasifik termasuk Papua Nugini. Maka penulis menggunakan penelitian analisis retorik dengan menggunakan konsep *soft balancing* yang terdiri dari strategi *territorial denial*, *entangling diplomacy*, *economic strengthening* dan *signals of resolve to balance* sebagai alat yang dapat menjelaskan rumusan masalah penelitian.

1.8.2 Subyek Penelitian

Objek penelitian yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian kali ini adalah Pemerintah Australia pada periode PM Malcolm Turnbull (2015-2018) dan Perdana Menteri Scott Morrison (2018-2019). Penulis akan meneliti setiap kebijakan pemerintah Australia dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini.

1.8.3 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Sumber bacaan berasal dari dua sumber yakni sumber bacaan utama dan sumber bacaan tambahan (Syamsyuddin & Damaianti, 2009, p. 61). Sumber bacaan yang berasal dari penulis asli atau peneliti. Sumber bacaan utama mengandung laporan atau teori yang ditulis secara teknis dan terperinci. Sumber bacaan tambahan adalah sebuah bacaan yang berasal dari penelitian sebelumnya dan menggabungkan penelitian secara ilmiah. Sumber bacaan tambahan adalah dapat berupa monograf, artikel dan jurnal yang berisi tinjauan penelitian (Syamsyuddin & Damaianti, 2009, p. 61).

Sumber bacaan utama dalam penelitian ini adalah bahan bacaan yang membahas teori *soft balancing*, dokumen dan situs resmi dari pemerintah Australia seperti Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia (*Australia Foreign Policy White Paper*) Buku Putih Pertahanan Australia (*Defence White Paper*) dan pernyataan pemerintah melalui situs web resmi Australia. Sumber bacaan tambahan adalah berasal dari berita dan article yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk gambar, kata-kata dan bukan dalam bentuk angka (Yusuf, 2014, p. 333).

Dari alat pengumpulan data yang telah disebutkan, penulis akan mendapatkan data terkait dinamika kebijakan Australia dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini.

1.8.4 Tahap tahap Proses Penelitian

Penelitian ini telah merumuskan masalah yakni bagaimana aplikasi *soft balancing* Australia sebagai upaya mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini tahun 2015-2019

Tahapan selanjutnya adalah studi literatur. Fungsi dari studi literatur adalah untuk mengidentifikasi Australia yang mengeluarkan kebijakan untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019 sesuai dengan konsep *soft balancing*. Setelah melakukan studi literatur, maka penulis akan memahami gagasan literatur tersebut kemudian mengaplikasikannya setiap kebijakan Australia dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019 sesuai dengan konsep *soft balancing* dalam bentuk analisis retorik sehingga penelitian dapat menjawab rumusan masalah.

BAB II

ANCAMAN TIONGKOK DI PAPUA NUGINI TERHADAP AUSTRALIA

Pada bab ini, akan menjelaskan tiga sub bab. Sub bab Pertama adalah Identifikasi Kepentingan Australia di Papua Nugini. Tujuan sub bab pertama adalah untuk menjelaskan bahwa Papua Nugini sebagai negara yang penting bagi Australia baik dari segi keamanan, militer dan ekonomi. Sub Bab kedua adalah Identifikasi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam bagi Australia. Tujuan Sub bab kedua adalah untuk mengidentifikasi pengaruh Tiongkok dengan menjelaskan ancaman keamanan, militer dan ekonomi Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam kepentingan Australia.

2.1 Identifikasi Kepentingan Australia di Papua Nugini

Secara geografis, Australia berdekatan dengan Papua Nugini. Papua Nugini memiliki posisi yang strategis yang dapat menguntungkan Australia. Posisi tersebut baik dari segi laut dan udara dapat menghubungkan perdagangan vital dan mitra pertahanan yang berada di Amerika Utara dan Asia Timur Laut (Wallis, 2014, p. 161). Pada bab ini memiliki dua poin. Poin pertama menjelaskan kepentingan Australia di Papua Nugini dari segi keamanan dan militer. Poin kedua menjelaskan kepentingan Australia di Papua Nugini dari segi ekonomi.

2.1.1. Identifikasi Kepentingan Australia di Papua Nugini dari Segi

Kepentingan Keamanan dan Militer

Dari segi keamanan, Papua Nugini adalah sebuah kawasan yang penting bagi keamanan Australia dan kawasan disekitarnya. Wilayah terdekat dapat

dijadikan sebagai pangkalan oleh penguasa asing untuk menyerang Australia sebagaimana pengalaman Australia pada Perang Dunia Kedua (Brown, 2012, p. 5). Pada tanggal 4-8 Mei 1942 merupakan suatu masa dimana adanya peristiwa Invasi Port Moresby atau Pertempuran Laut Koral (*The Battle of Coral Sea*) (Frei, 2019).

Invasi tersebut dijadikan sebagai bagian dari rencana Kekaisaran Jepang untuk menginvasi Fiji, Samoa dan Kelodonia Baru atau disebut sebagai *FS Operation*. Invasi ketiga wilayah *FS Operation* bertujuan agar Kekaisaran Jepang dapat memblokade pasokan dari AS kepada Australia (Frei, 2019). Meskipun rencana tersebut memiliki hasil yang tidak menguntungkan bagi Jepang, setidaknya peristiwa tersebut dapat dijadikan pedoman sehingga Australia perlu untuk menjadikan Papua Nugini sebagai benteng bagi keamanan Australia pada masa kini dan masa depan.

Berdasarkan dokumen pertahanan Australia yang dipublikasikan pada tahun 2013 menyatakan bahwa ada empat kapasitas yang diharapkan pemerintah Australia kepada ADF dalam melakukan tugasnya. Dua diantaranya adalah, Pertama mencegah dan melawan serangan bersenjata di Australia. Kedua adalah berkontribusi atas kestabilan dan keamanan di Pasifik Selatan dan Timor-Leste (Australian Government, 2013, p. 28). Dengan demikian, wilayah Pasifik termasuk prioritas kedua setelah keamanan nasional Australia itu sendiri.

Untuk menguatkan keamanan kawasan terutama kawasan terdekat Australia, dokumen pertahanan Australia terbaru yakni 2016 *Defence White Paper* menjelaskan strategi pertahanan Australia yang berisi tiga kepentingan pertahanan Australia. Kepentingan pertama adalah masih berkaitan dengan keamanan nasional Australia yakni mencapai Australia yang aman dan tangguh. Tujuannya adalah untuk mencegah, menghalangi dan melawan segala upaya yang dilakukan suatu negara atau non negara yang menyerang, mengancam dan merugikan Australia (Australian Government:Defence White Paper, 2016, p. 17).

Kepentingan kedua adalah kawasan terdekat yang aman meliputi Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Uniknya adalah dalam kepentingan kedua ini, Papua Nugini disebutkan secara eksplisit dimana Australia berupaya menjadikan Papua Nugini sebagai mitra utama dalam bidang keamanan di kawasan. Sebagaimana penulis kutip dari dokumen tersebut bahwa (Australian Government:Defence White Paper, 2016, p. 17)

“ ...Australia will continue to seek to be the principal security partner for Papua New Guinea, Timor-Leste and Pacific Island Countries in the South Pacific”

Meskipun terdapat perbedaan antara dokumen pertahanan Australia pada tahun 2013 dan 2016, namun disimpulkan bahwa Australia tetap memprioritaskan Papua Nugini dalam meningkatkan keamanan kawasan.

Berdasarkan prioritas tersebut, penulis mendalami bahwa pentingnya Papua Nugini sebagai mitra keamanan bagi Australia, dikarenakan Papua

Nugini merupakan salah satu negara yang terletak berada di Pasifik Selatan. Berikut penjabaran kepentingan strategis pertahanan Australia (Department of Defense United States of America, 2016, pp. 17-18)

- Australia yang aman dan tangguh dengan pendekatan kawasan sebelah utara dan komunikasi garis laut terdekat; Maksudnya adalah Australia yang aman termasuk kawasan disekitarnya, yakni kawasan utara, Zona Ekonomi Eksklusif dan kawasan diluar teritori seperti Samudera Selatan dan Wilayah Antartika. Pemahaman dari Australia yang aman dan tangguh memiliki dua pengertian. Pertama adalah perlindungan terhadap ancaman non geografis seperti serangan siber, senjata anti satelit dan sistem rudal balistik. Kedua adalah kepentingan akan melawan dari serangan tak terduga baik yang berasal dari bencana alam atau perbuatan manusia. Dengan demikian Australia dapat memulihkan diri dengan cepat jika adanya kejadian tak terduga.
- Kawasan terdekat yang aman, termasuk kondisi maritim Asia tenggara dan Pasifik Selatan; Maksudnya adalah Australia perlu memperluas cakupan pengaruhnya mencapai kepentingan keamanannya. Maka Australia tidak membiarkan negara tetangga menjadi sebuah tempat untuk menjadikan pangkalan militer asing yang mencelakakkan Australia nantinya. Sehingga bekerjasama dengan Papua Nugini, Timor-Leste dan Negara Kepulauan Pasifik

sebagai bentuk langkah pencegahan dini terhadap ancaman yang muncul nantinya.

- Kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan sesuai dengan tatanan global berdasar hukum; Maksudnya adalah agar kawasan Indo-Pasifik yang stabil dapat menguntungkan Australia dari segi perdagangan. Kawasannya termasuk Asia Utara, Laut Tiongkok Selatan dan jalur komunikasi laut di Samudera India dan Pasifik. Jika kawasan tersebut stabil maka dapat dipastikan Australia memiliki akses yang bebas, terbuka dan menguntungkan.

2.1.2. Identifikasi Kepentingan Australia di Papua Nugini dari Segi Hubungan

Ekonomi

Australia berkomitmen untuk mendukung terhadap perkembangan ekonomi Papua Nugini. Hal ini dibuktikan dengan total hubungan dagang antar keduanya, hubungan ekspor impor dan *development assistance*.

- Hubungan dagang

Pada tahun 2015-2016 total hubungan dagang antar keduanya mencapai A\$6,4 miliar dan investasi Australia di Papua Nugini bernilai sebesar A\$19 miliar (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2016, p. 3). Sedangkan pada tahun 2017-2018 total hubungan dagang antar keduanya mencapai \$5,9 miliar dan investasi Australia di Papua Nugini bernilai sebesar \$18 miliar (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2018, p. 2).

Sehingga total untuk hubungan dagang sejak 2015-2018 antar Australia dan Papua Nugini bernilai sebesar \$12,3 Miliar sedangkan untuk Investasi Australia terhadap Papua Nugini sejak tahun 2015-2018 bernilai sebesar \$37 Miliar.

- Hubungan Ekspor Impor

Australia adalah mitra dagang terbesar Papua Nugini. Ekspor Australia ke Papua Nugini didominasi oleh minyak mentah, daging, peralatan teknik, mesin khusus dan gandum. Sedangkan Impor utama Australia dari Papua Nugini adalah emas, minyak mentah, perak dan platinum. Berdasarkan data yang diperoleh dari *The Observatory of Economic Complex* tahun 2015-2017 (*The Observatory of Economic Complexity, 2015*) dan *Country Fact Sheet Papua New Guinea 2018* (Australian Government:Department of Foreign Affairs and Trade, 2019), Australia adalah negara sumber impor terbesar Papua Nugini dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan demikian, sejak tahun 2015-2018, Australia menjadi pemasok utama minyak mentah, daging, peralatan teknik, mesin khusus dan gandum bagi Papua Nugini. Berikut tabel tiga Sumber utama Impor Papua Nugini tahun 2015-2018

Tabel 2. 1 Sumber Utama Impor Papua Nugini 2015-2018

Tahun	Peringkat	Negara	Persentase	Nilai
	1	Australia	25%	\$1,14

2015				Miliar
	2	Tiongkok	22%	\$768 Juta
	3	Singapura	13%	\$581 Juta
	1	Australia	31%	\$1,19 Miliar
2016	2	Tiongkok	17%	\$648 juta
	3	Singapura	9,8%	\$372 Juta
	1	Australia	32%	\$1,14 Triliun
2017	2	Tiongkok	22%	\$990 juta
	3	Singapura	12%	\$441 Juta
2018				\$2,179 Miliar
	1	Australia	34.20%	Miliar

Sedangkan, meskipun pada tahun 2015 bukan sebagai mitra impor terbesar Papua Nugini, namun pada tahun berikutnya yakni 2016-2018, Australia menjadi mitra impor terbesar dibandingkan dengan negara lainnya. Selain itu, Tiongkok menjadi mitra ekspor nomor tiga di Papua Nugini.

Tabel 2. 2 Destinasi Ekspor Papua Nugini 2015-2018

Tahun	Peringkat	Negara	Persentase	Nilai
2015	1	Jepang	27%	\$2,46 Miliar
	2	Australia	24%	\$2,21 Miliar
	3	Tiongkok	19%	\$1,73 Miliar
2016	1	Australia	32%	\$2,61 Miliar
	2	Jepang	22%	\$1,84 Miliar
	3	Tiongkok	18%	\$1,5 Miliar
2017	1	Australia	29%	\$2,54 Miliar
	2	Jepang	25%	\$2,23 Miliar
	3	Tiongkok	22%	\$1,94 Miliar

				Miliar
2018	1	Australia	20,10%	\$3,591 Miliar

- Hubungan Bantuan Luar Negeri

Australia memiliki kepentingan dengan hubungan yang telah dijalin dengan Papua Nugini. Berdasarkan *2017 Australia White Paper* (2017) menyatakan bahwa kepentingan Australia yakni mewujudkan kawasan yang stabil dan sejahtera. Dengan kondisi geografis yang dekat dan hubungan sejarah antar keduanya, maka Australia melakukan hubungan *development assistance* dengan Papua Nugini sebagai wujud nyata terhadap kepentingan nasional. Dari segi bantuan luar negeri, Australia adalah pendonor terbesar untuk Papua Nugini yakni A\$549,7 juta untuk tahun 2015-2016 (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2016, p. 5), A\$547,1 juta untuk tahun 2016-2017 (Australian

Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2017) dan A\$541 juta untuk tahun 2017-2018 (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2018, p. 4). Sehingga total bantuan luar negeri Australia untuk Papua Nugini lebih banyak dibandingkan bantuan luar negeri Tiongkok dengan nilai bantuan luar negeri Australia sebesar \$1.677,8 juta. Bantuan luar negeri tersebut diberikan untuk membantu Papua Nugini dalam sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, perbaikan hukum dan pelayanan sipil, transportasi, pemerintahan dan bantuan dari segi gender dan kemanusiaan (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2016, p. 5; Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2017, p. 4; Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2018, p. 4).

Berikut tabel Performa Bantuan Luar Negeri Australia kepada Papua Nugini dari tahun 2015-2018

Tabel 2. 3 Bantuan Luar Negeri Australia kepada Papua Nugini tahun 2015-2018

Tahun	Dalam Juta Dolar Australia
2015-2016	549,7
2016-2017	547,1
2017-2018	541,0
Total	1.677,8

2.2 Identifikasi Ancaman Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini terhadap Australia

Berdasarkan kecurigaan Australia terhadap pengaruh Tiongkok di Pasifik akan menghasilkan kondisi *zero-sum*, maka terlebih dahulu menjelaskan kembali apa saja ancaman dari Pengaruh Tiongkok di Pasifik khususnya di Papua Nugini. Sesuai dengan *China Threat Theory* yang mendukung teori realis klasik bahwa suatu negara melakukan interaksi internasional yang bersifat “*hard*” yaitu kekuatan militer dan ekonomi dan kepentingan nasional lainnya (Hill M. , 2010, p. 43).

Maka dalam penjelasan berikutnya akan dibagi menjadi dua bagian yakni identifikasi ancaman pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam Australia dari segi keamanan dan militer. Sub bab kedua adalah identifikasi ancaman pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam Australia dari segi ekonomi. Ketiga identifikasi ancaman pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam Australia dari segi kepentingan nasional.

2.2.1 Identifikasi Ancaman Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini terhadap

Australia dari Segi Keamanan dan Militer

Pada pembahasan ini menjelaskan dua ancaman. Pertama menjelaskan mengenai Ancaman Keamanan Siber. Kedua, Ancaman dari segi Kerjasama Militer antara Tiongkok-Papua Nugini.

- Ancaman Keamanan Siber

Pada tahun 2016, *Huawei Marine*, perusahaan *private* gabungan *Huawei Technologies Co.,Ltd* dan *Global Marine Sysrem Limited* mengumumkan akan

membantu Papua Nugini untuk membangun sebuah Jaringan Transmisi *Broadband* Nasional. *Huawei Marine* bersama perusahaan telekomunikasi negara, *PNG Dataco Limited* akan membangun sebuah jaringan kabel bawah laut nasional sepanjang 5.457 km untuk menyediakan dan menyambungkan jaringan telekomunikasi di 14 kota dan wilayah pesisir. Rencananya, kapasitas dari desain dari pembangunan jaringan kabel bawah laut tersebut sebesar 8 Terabita per detik (Huawei, 2016). Dan Pada tahun 2017, proyek *National Broadband Network* telah selesai dibangun dengan biaya sebesar USD 50.94 juta. Dana proyek berasal dari dana gabungan antara *GoPNG* dan *Eximbank China* (Lowy Institute, 2018).

Padahal Huawei menurut perspektif Australia adalah sebuah ancaman siber. Karena diduga dapat menggunakan aktivitas spionase. Menurut mantan PM Malcolm Turnbull menyatakan dalam wawancara CNBC bahwa Australia telah berusaha untuk menyertakan Huawei dan ZTE sebagai vendor jaringan 5G di Australia, namun tetap tidak karena Australia belum mampu untuk mengurangi ancaman oleh vendor tersebut. Ancaman dapat berupa spionase melalui jaringan seluler berkecepatan tinggi (Choudrhury, 2019).

- Ancaman dari segi Kerjasama Militer Tiongkok-Papua Nugini

Dari segi kerjasama militer, Tiongkok telah membuat beberapa *engagement*. Berikut beberapa *engagement* antara Tiongkok dan Papua Nugini. Pada tanggal 3 November 2017, Duta besar Tiongkok untuk Papua Nugini, Xue Bing diundang untuk menghadiri serah terima bantuan Tiongkok akan

kendaraan militer baru kepada Papua Nugini. Menurut Xie Bing, Tiongkok telah membantu berkontribusi dalam hal infrastruktur dan peningkatan kapasitas tentara Papua Nugini sehingga harapannya hubungan militer antar keduanya semakin kuat (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2017).

Pada tahun yang sama yakni tahun 2017, Tiongkok memberikan donasi peralatan militer sebanyak 44 *troop carriers*, 10 kendaraan lapis baja, empat bus berisi 45 kursi, empat van serta suku cadangnya telah disumbangkan ke Angkatan Pertahanan Papua Nugini senilai USD 5.34 juta (Lowy Institute, 2018)

Pada tanggal 26 Juli 2018, Papua Nugini dan Tiongkok telah menandatangani perjanjian kerjasama militer. Dimulai dengan kunjungan kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok (*Chinese Navy's "Square Boat" hospital ship*) sebagai *ceremonial* untuk menandai hubungan militer antar keduanya. Kapal tersebut digunakan untuk layanan medis kemanusiaan kepada Papua Nugini (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2018) (Motegi, 2019).

2.2.2 Identifikasi Ancaman Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini terhadap

Australia dari Segi Ekonomi

Menurut McKenna (2014) bahwa pengaruh Tiongkok di Pasifik membuat Pasifik kini memiliki pilihan untuk bermitra dimana sebelumnya tidak, sehingga Australia kehilangan kepentingannya yakni tidak lagi dapat

mengendalikan ruang kebijakan (McKenna, 2014). Artinya adalah penurunan pengaruh pemerintah Australia di Pasifik Selatan akan mengurangi kemampuan untuk mengontrol Keamanan Australia (Hegarty, 2015, p. 8).

Lalu pengaruh ekonomi Tiongkok apa saja yang membuat Australia tersaingi? Berikut pengaruh Ekonomi Tiongkok di Papua Nugini.

Dari segi bantuan luar negeri, total bantuan yang dihabiskan Tiongkok untuk Papua Nugini pada tahun 2015-2018 sebesar USD 139.30 juta (2018). Dengan demikian, Papua Nugini adalah negara penerima donor terbanyak dari Tiongkok. Secara keseluruhan bantuannya ada pada sektor agrikultur, pertanian dan kehutanan, komunikasi, pendidikan, pemerintah dan masyarakat sipil, kesehatan, bantuan kemanusiaan, industri, pertambangan dan konstruksi, infrastruktur, pelayanan dan transportasi. Namun, total bantuan luar negeri Tiongkok berada pada sektor transportasi sebesar 28% ,pendidikan sebesar 18%, industri, pertambangan dan konstruksi 16% (Brant, 2015).

Berdasarkan data dari *Lowy Institute* berikut (2018), Proyek Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini dari tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut (Lowy Institute, 2018)

Tabel 2. 4 Proyek Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini dari tahun 2015-2018

Tahun	Nama Proyek	Biaya	Sektor	Keterangan
2012 dimulai 2015 ditunda 2016 peresmian	<i>Waigani Convention Centre</i>	USD 3.96 juta	Infrastruktur lainnya	100% selesai
2015	<i>Pacific Marine Industrial</i>	USD 11.83 Juta	Industri, Pertambangan dan	100% selesai

	<i>Zone</i>		Konstruksi	
2016	<i>Pacific Marine Industrial Zone</i>	USD 9.19 juta	Industri, Pertambangan dan Konstruksi	100% selesai
2015	<i>Western Pacific University</i>	USD 25.35 juta	Pendidikan	0% progres
2016	<i>New Ensa Provincial Hospital</i>	USD 162.64	Kesehatan	0% progres
2016	<i>Community College</i>	USD 9.27 Juta	Pendidikan	100% selesai
2017	<i>Telikom(PNG) Limited</i>	USD 1.52 juta	Komunikasi	100% selesai
2017	<i>50-MW Edevu Hydropower Project</i>	USD 217.60 juta	Energi	0% progres
2017	<i>High Priority Economic Road Project</i>	USD 3.50 miliar	Transportasi	0% progres
2017	<i>Pacific Marine Industrial Zone</i>	USD 1.52 juta	Industri, Pertambangan dan Konstruksi	100% selesai
2017	<i>Garoka Town Water Supply</i>	USD 32 juta	Air dan Sanitasi	0% progres
2017	<i>Integrated Agricultural Industrial Parks in Western Highlands and Eastern Highlands</i>	USD 330 juta	Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan	0% progres
2017	<i>Kokopo Town Sewerage</i>	USD 1.65 juta	Air dan Sanitasi	100% selesai
2017	<i>National Broadband Network</i>	USD 50.94 juta	Komunikasi	100% selesai
2018	<i>132KV Transmission Lines</i>	USD143.07	Energi	0% progres

Selain bantuan luar negeri dan proyek infrastruktur, Tiongkok mengekspresikan hubungannya dengan Papua Nugini melalui hubungan Investasi dan perdagangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari *China Power* menuliskan bahwa Investasi Tiongkok kepada Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar \$1,418 Miliar (China Power, 2017) sedangkan hubungan dagangnya jika ditinjau dari ekspor Tiongkok ke Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar \$2,406 Miliar dengan produk ekspor terdiri dari Peralatan Penyiaran, ban karet, senyawa kimia *sodium* dan *potasium peroxide*, kapal kargo dan penumpang ke Papua Nugini (The Observatory of Economic Complexity, 2017). Sedangkan, jika ditinjau dari Impor Tiongkok ke Papua Nugini, maka sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar \$5,17 Miliar dimana Tiongkok mengimpor minyak dan gas bumi, kayu, nikel, tembaga dan logam mulia dari Papua Nugini (The Observatory of Economic Complexity, 2017).

2.2.3 Identifikasi Ancaman Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini terhadap

Australia dari Segi Kepentingan Lainnya

Dari segi kepentingan lainnya, penulis mengambil studi kasus dari segi politik. Dari segi politik, Tiongkok mampu mengupayakan kepentingannya dengan cara melakukan tekanan publik agar Pemerintah Papua Nugini dan pemerintah lain di kawasan Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Contohnya adalah pada saat kunjungan mantan PM Peter O'Neill berkunjung di Tiongkok pada tanggal 5-10 Juli 2016. Diplomat

Tiongkok melakukan tekanan kepada negara Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Jones, 2017). Sehingga berdasarkan hasil pertemuan bilateral antar kedua negara menghasilkan pers bersama bahwa Papua Nugini menghargai dan mendukung Tiongkok dalam isu Laut Tiongkok Selatan dengan cara mendukung Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai bersama para pihak langsung melalui konsultasi dan negosiasi sesuai dengan hukum internasional (Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016).

BAB III

APLIKASI *SOFT BALANCING* AUSTRALIA SEBAGAI UPAYA MENGIMBANGI PENGARUH TIONGKOK DI PAPUA NUGINI PADA TAHUN 2015-2019

3.1 Aplikasi *Territorial Denial* Australia sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini

Territorial Denial, indikator ini diaplikasikan ketika suatu negara superior sering mendapatkan manfaat dari negara ketiga untuk dijadikan sebagai wilayah pementasan angkatan darat atau tempat transit angkatan laut. Maka bentuk *territorial denial* adalah berusaha untuk menghalangi kekuatan superior dengan cara menolak akses agar kekuatan asing tidak memiliki pengaruh disuatu wilayah tertentu dengan cara meningkatkan masalah logistik atau memaksanya bertarung dengan kekuatan angkatan laut atau udara saja (Pape, 2005, p. 36).

Berdasarkan definisi *territorial denial*, Tiongkok dapat disebut sebagai negara superior yang mendapatkan manfaat dari negara ketiga untuk dijadikan sebagai wilayah pementasan angkatan darat. Beberapa Pementasan angkatan darat dan laut Tiongkok di Papua Nugini peristiwa pada tanggal 3 November 2017, Duta besar Tiongkok untuk Papua Nugini, Xue Bing diundang untuk menghadiri serah terima bantuan Tiongkok akan kendaraan militer baru kepada Papua Nugini (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2017). Pada tahun yang sama juga Tiongkok melanjutkan pengaruhnya dengan memberikan sumbangan peralatan militer kepada angkatan pertahanan Papua Nugini sebanyak 44 *troop carriers*, 10

kendaraan lapis baja, empat bus berisi 45 kursi, empat van serta suku cadangnya yang bernilai USD 5.34 juta (Lowy Institute, 2018). Dan peristiwa pada tanggal 26 Juli 2018, kunjungan kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok (*Chinese Navy's "Square Boat" hospital ship*) sebagai *ceremonial* untuk menandai hubungan militer antar keduanya (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2018).

Namun, belum ada upaya *territorial denial* Australia untuk mengimbangi pementasan angkatan darat dan laut Tiongkok di Papua Nugini. Australia belum melakukan penolakan akses teritorial secara langsung kepada Tiongkok. Sebagaimana Robert Pape menjelaskan bahwa suatu negara mengimbangi negara lain dengan cara menolak akses teritorial atau meningkatkan masalah logistik atau memaksa Tiongkok untuk bertarung dengan kekuatan angkatan laut atau udara saja.

Pape (2005) menjelaskan bahwa untuk melakukan *territorial denial*, sebuah negara menolak akses teritorial dengan cara menolak secara langsung. Studi kasus yang pernah terjadi adalah Turki menolak upaya AS menggunakan wilayah teritorial Turki sebagai tempat pementasan angkatan darat AS. Hal ini didahului oleh permintaan AS kepada Turki untuk mengizinkan penempatan 60.000-90.000 pasukan angkatan darat AS melalui Turki untuk menginvasi Irak. Namun Turki tidak menyetujui rencana AS tersebut dengan cara Turki menjawab “pemerintah telah mengindikasikan kesiapannya untuk memenuhi permintaan AS di semua area, kecuali penempatan pasukan angkatan darat AS di Turki” (Gordon, 2003).

Meskipun Australia tidak mengaplikasikan *territorial denial*, namun pementasan angkatan darat dan laut Tiongkok telah diimbangi oleh Australia dengan

menggunakan upaya lain yakni mengaplikasikan *signal of resolve to balance* yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

3.2 Aplikasi *Entangling Diplomacy* sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh

Tiongkok di Papua Nugini

Entangling Diplomacy, dari indikator ini menjelaskan cara untuk mengimbangi negara lain dengan menggunakan organisasi internasional dan manuver diplomatik. Tujuannya adalah untuk menunda, memperumit dan mencegah negara lain menghasilkan perang. Selain itu, *entangling diplomacy* juga bertujuan untuk merusak rencana dan kebijakan negara superior khususnya dengan menggunakan norma institusi internasional (Pape, 2005, p. 36).

Dari segi politik, Tiongkok mampu mengupayakan kepentingannya dengan cara melakukan tekanan publik agar Pemerintah Papua Nugini dan pemerintah lain di kawasan Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Contohnya adalah pada saat kunjungan mantan PM Peter O'Neill berkunjung di Tiongkok pada tanggal 5-10 Juli 2016. Diplomat Tiongkok melakukan tekanan kepada Pemerintah Papua Nugini untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Jones, 2017).

Padahal, aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan memasuki tahap yang membahayakan seperti pembagunan kontruksi yang menciptakan bentrokan dengan berbagai pihak yakni nelayan, penjaga pantai dan kerusakan aset laut (Hill C. , 2016). Dengan demikian Australia yang mendukung tatanan global berdasar hukum di Indo-Pasifik mengalami tekanan yang signifikan. Kepentingan dan hubungannya dengan Tiongkok sedang diuji (Hill C. , 2016).

Berdasarkan studi kasus tersebut diketahui bahwa Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan adalah sebuah ambisi Tiongkok yang tidak bersesuaian kepentingan Australia yakni pendukung tatanan global berdasar hukum di Kawasan Indo-Pasifik. Kemudian Australia berada dalam perspektif yang berbeda dengan Papua Nugini terkait pengakuannya terhadap posisi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016). Hal ini berlawanan dengan kepentingan Australia yakni” kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan sesuai dengan tatanan global berdasar hukum; Maksudnya adalah agar kawasan Indo-Pasifik yang stabil dapat menguntungkan Australia dari segi perdagangan. Kawasannya termasuk Asia Utara, Laut Tiongkok Selatan dan jalur komunikasi laut di Samudera India dan Pasifik. Jika kawasan tersebut stabil maka dapat dipastikan Australia memiliki akses yang bebas, terbuka dan menguntungkan (Australian Government:Defence White Paper, 2016, pp. 17-18).

Dengan demikian, Australia mengimbangi Tiongkok dengan menggunakan upaya *entangling diplomacy*. Australia bekerjasama dengan menggunakan *manuver* diplomatik, bekerjasama dengan negara lain untuk meyakinkan Tiongkok tentang resiko dari tindakan sepihaknya di sengketa Laut Tiongkok Selatan. Upaya *Entangling Diplomacy* Australia dapat ditelusuri dari upaya ASEAN yang melibatkan AS dan Tiongkok seperti KTT Asia Timur. Keikutsertaan Australia dalam KTT Asia Timur adalah rencana diplomatis dan strategis utama Australia untuk mengatasi sengketa Laut Tiongkok Selatan secara multilateral (Hill C. , 2016).

Australia menggunakan norma institusi untuk menunda, memperumit dan mencegah ambisi Tiongkok Laut Tiongkok Selatan dengan cara mengumumkan pernyataan bersama dengan dua negara lain, AS dan Jepang. Pernyataan tersebut berisi desakan agar Tiongkok mematuhi keputusan arbitrase Konfensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) tahun 2016 (Liu, 2017). Pernyataan bersama diumumkan selama 50th ASEAN *Ministrial Meeting* berlangsung. Pernyataan ketiga negara tersebut adalah (Gao, 2017)

“The ministers called on China and the Philippines to abide by the Arbitral tribunal’s 2016 Award in the Philippines-China arbitration, as it is final and legally binding on both parties... The minister urged ASEAN member states and China to fully and effectively implement the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea(DOC)”

Setelah itu, Australia, Jepang dan AS menegaskan kembali bahwa Tiongkok dan anggota ASEAN perlu untuk membuat *Code of Conduct* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang mengikat secara hukum, efektif dan bersesuaian dengan hukum internasional. Pertanyaan tersebut adalah (Gao, 2017)

“The ministers acknowledged the announced consensus on a framework for the Code of Conduct for the South China Sea(COC). The minister further urged ASEAN member and China to ensure that the COC be finalized in a timely manner, and that it be legally binding, meaningful, effective, and consistent with international law”

3.3 Aplikasi *Economic Strengthening* sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini

Economic strengthening adalah membangun suatu blok perdagangan dalam upaya menyeimbangkan kekuatan negara superior. Kekuatan militer yang kuat

didukung oleh ekonomi yang kuat. Negara superior tentunya memiliki kekuasaan yang besar baik dalam militer dan ekonomi. Untuk mengimbangnya, setidaknya untuk jangka panjang adalah meningkatkan ekonomi masing-masing. Salah satu cara adalah dengan membangun sebuah blok perdagangan regional yang dapat meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi untuk para anggota blok tetapi dengan tidak menyertakan negara superior tersebut. Jika berhasil, maka secara keseluruhan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi negara superior (Pape, 2005, p. 36).

3.3.1 *Seasonal Workers Program* sebagai *Economic Strengthening* Australia dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini

Studi kasus yang dapat masuk dalam indikator *economic Strengthening* adalah *Seasonal Workers Program*. Program ini muncul bukan dijadikan sebagai mengimbangi langsung atas Pengaruh Tiongkok, namun dapat dijadikan sebagai upaya Australia mempererat hubungan dengan negara-negara Pasifik demi meningkatkan keamanan regional (Hegarty, 2015, p. 9) sesuai dengan kepentingan Australia yakni menjaga keamanan regional dan meningkatkan pengaruh di Pasifik (Australian Government: Defence White Paper, 2016). Untuk itu perlu diketahui apa saja Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini, lalu menjelaskan *Seasonal Workers Program* sebagai kebijakan untuk meningkatkan keamanan dan pengaruh di Pasifik khususnya di Papua Nugini.

Menurut McKenna (2014) bahwa pengaruh Tiongkok di Pasifik membuat Pasifik kini memiliki pilihan untuk bermitra dimana sebelumnya tidak,

sehingga Australia kehilangan kepentingannya yakni tidak lagi dapat mengendalikan ruang kebijakan (McKenna, 2014). Artinya adalah penurunan pengaruh pemerintah Australia di Pasifik Selatan akan mengurangi kemampuan untuk mengontrol Keamanan Australia (Hegarty, 2015, p. 8).

Lalu pengaruh ekonomi Tiongkok apa saja yang membuat Australia tersaingi? Berikut pengaruh Ekonomi Tiongkok di Papua Nugini.

Dari segi bantuan luar negeri, total bantuan yang dihabiskan Tiongkok untuk Papua Nugini pada tahun 2015-2018 sebesar USD 139.30 juta (2018). Dengan demikian, Papua Nugini adalah negara penerima donor terbanyak dari Tiongkok. Secara keseluruhan bantuannya ada pada sektor agrikultur, pertanian dan kehutanan, komunikasi, pendidikan, pemerintah dan masyarakat sipil, kesehatan, bantuan kemanusiaan, industri, pertambangan dan konstruksi, infrastruktur, pelayanan dan transportasi. Namun, total bantuan luar negeri Tiongkok berada pada sektor transportasi sebesar 28% ,pendidikan sebesar 18%, industri, pertambangan dan konstruksi 16% (Brant, 2015).

Pengaruh Tiongkok yang ada tentunya Australia perlu untuk mengimbangnya dengan melakukan pengaruh yang lebih banyak di Papua Nugini daripada Tiongkok. Salah satu bentuk perimbangan Australia terhadap Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang sesuai dengan *economic strengthening* adalah *Seasonal Workers Program*.

Seasonal Workers Program sebuah program bagi pengusaha untuk merekrut petani agrikultur yang berasal dari negara-negara Pasifik untuk bekerja di Australia. *Seasonal Workers Program* dimulai sejak tahun 2012 hingga saat ini (Australian Government: Department of Employment, Skills, Small and Family Business, 2019). Istilah *seasonal* atau musiman adalah sebuah peluang bagi pekerja asal Pasifik untuk memiliki kesempatan bekerja di Australia jika pekerja lokal tidak cukup untuk memenuhi permintaan musiman. Sehingga bagi petani yang mengikuti program tersebut disebut *Seasonal Workers*.

Seasonal Workers memiliki keuntungan untuk mendapatkan gaji dan kesempatan belajar yang berharga di Australia. Banyak dari *Seasonal Workers* mampu memanfaatkan gaji tersebut untuk membiayai pendidikan anaknya, memulai bisnis baru atau membangun rumah. Sehingga bagi para petani, ini adalah sebuah kesempatan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Target dari negara asal petani adalah negara kepulauan Pasifik. Petani yang telah berpartisipasi adalah Papua Nugini, Tonga, Vanuatu, Samoa, Tuvalu, Kiribati, Kepulauan Solomon dan Timor-Leste (Australian Government: Department of Employment, Skills, Small and Family Business, 2019).

Partisipasi Papua Nugini dalam *Seasonal Workers Program* dari tahun ke tahun meningkat. Meskipun sejak dibentuknya *Seasonal Workers Program* tahun 2012, namun pada tahun 2015 hingga 2016 terlihat adanya peningkatan

akan partisipasi Papua Nugini dalam *Seasonal Workers Program*. Dikutip dari *Australian Bureau of Agricultural and Resources Economic and Sciences*, berikut tabel partisipasi Papua Nugini adalah *Seasonal Workers Program* (Zhao, Binks, Kruger, Xia, & Stenekes, 2018)

Tabel 3. 1 Partisipasi Papua Nugini adalah Seasonal Workers Program dari tahun 2012-2016

Negara	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Papua Nugini	26	26	35	42

Melalui *Seasonal Workers Program*, Australia membentuk sebuah blok perdagangan yang menguntungkan antar sesama anggotanya dimana anggotanya terdiri dari Australia, Papua Nugini dan negara Pasifik lainnya tanpa Tiongkok. Hal ini sesuai dengan definisni *economic strengthening* yakni membentuk sebuah blok perdagangan tanpa adanya negara superior (Pape, 2005, p. 36).

3.3.2 Kerjasama Sistem Kabel Laut Koral sebagai *Economic Strengthening*

Australia dalam mengimbangi Huawei di Papua Nugini

Pada tahun 2016, *Huawei Marine*, perusahaan *private* gabungan *Huawei Technologies Co.,Ltd* dan *Global Marine Sysrem Limited* mengumumkan akan membantu Papua Nugini untuk membangun sebuah Jaringan Transmisi *Broadband* Nasional. *Huawei Marine* bersama perusahaan telekomunikasi

negara, *PNG Dataco Limited* akan membangun sebuah jaringan kabel bawah laut nasional sepanjang 5.457 km untuk menyediakan dan menyambungkan jaringan telekomunikasi di 14 kota dan wilayah pesisir. Rencananya, kapasitas dari desain dari pembangunan jaringan kabel bawah laut tersebut sebesar 8 Terabita per detik (Huawei, 2016). Pada tahun 2017, proyek *National Broadband Network* telah selesai dibangun dengan biaya sebesar USD 50.94 juta. Dana proyek berasal dari dana gabungan antara *GoPNG* dan *Eximbank China* (Lowy Institute, 2018).

Tujuan pembangunan jaringan tersebut adalah sebagai respon dari permintaan akan akses internet dan membantu mempercepat perkembangan sosial dan ekonomi di Papua Nugini. Menurut *PNG Dataco*, sistem ini sangat penting bagi Papua Nugini, karena selain mencakup jaringan kabel bawah juga menyediakan pintu gerbang internet dan pusat data. Sehingga dapat memperbaiki infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Papua Nugini (Huawei, 2016).

Padahal perspektif Australia akan Huawei adalah sebuah ancaman siber. Huawei diduga dapat menggunakan aktivitas spionase. Menurut mantan PM Malcolm Turnbull menyatakan dalam wawancara CNBC bahwa Australia telah berusaha untuk menyertakan Huawei dan ZTE sebagai vendor jaringan 5G di Australia, namun tetap tidak karena Australia belum mampu untuk mengurangi ancaman oleh vendor tersebut. Ancaman dapat berupa spionase melalui jaringan seluler berkecepatan tinggi (Choudrhury, 2019).

Sehingga bentuk *Economic Strengthening* Australia untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok adalah membangun kerjasama Sistem Kabel Laut Koral (*Coral Sea Cable System*). Kerjasama ini masuk dalam indikator *Economic Strengthening* karena kerjasama hanya dianggotai oleh tiga negara tanpa Tiongkok. Pada tanggal 11 Juli 2018, Australia, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon telah memandatangani *MoU* Sistem Kabel Laut Koral (*Coral Sea Cable System*, 2018). Pembangunan sistem ini dibiayai sebagian besar oleh *Australian Aid* Berikut Jangka Waktu Pembangunan Sistem Kabel Laut Koral (*Coral Sea Cable System*, 2018)

Tabel 3. 2 Jangka Waktu Pembangunan Sistem Kabel Laut Koral

<i>Momerandum of Understanding of System Coral Cable System</i>	11 Juli 2018	Selesai
<i>Design Finalisation</i>	September 2018	Selesai
<i>Marine Survey</i>	November 2018	Selesai
<i>Power Feed Equipment (PFE Manufacture)</i>	Januari 2019	Selesai
<i>Cable Manufacture</i>	April 2019	Selesai
<i>Equipment manufacture</i>	Maret 2019	Selesai
<i>Landing facilities and Land Cable Duct Run</i>	Juli 2019	Proses
<i>Ship to sites</i>	Agustus 2019	Proses

<i>Station Instalation</i>	September 2019	Proses
<i>Cable main lay</i>	Oktober 2019	Proses
<i>System Commissioning</i>	Desember 2019	Belum dimulai

Sistem Kabel Laut Koral adalah sebuah pembangunan kabel bawah laut fiber sepanjang 4.700km yang menghubungkan Sidney ke Port Moresby dan Honiora. Total kapasitas dari pembangunan sistem kabel tersebut adalah sebesar 40 Tpbs. Pembangunan tersebut akan menyediakan infrastruktur komunikasi yang lebih cepat, murah dan dapat diandalkan untuk memajukan perkembangan ekonomi Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Salah satu Perkembangan ekonomi yang dimaksud adalah memudahkan para bisnis lokal untuk menggunakan internet demi mencapai pasar mancanegara (Coral Sea cable System, 2018).

Dari Kerjasama ketiga negara tersebut pada akhirnya adalah sebagai upaya untuk memperkuat hubungan antar ketiga negara tanpa adanya Tiongkok. Upaya pembangunan Sistem Kabel Laut Koral juga dapat memperkuat ekonomi antar Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Sehingga. Kerjasama ini masuk dalam indikator *Economic Strengthening* karena anggota kerjasama disini selain negara superior dengan tujuan menguatkan ekonomi blok perdagangan setidaknya bagi Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.

3.3.3 Upaya Ekspor, Impor dan Investasi sebagai bagian dari *Economic*

Strengthening dalam upaya mengimbangi Pengaruh Perdagangan dan Investasi Tiongkok di Papua Nugini

Selain bantuan luar negeri dan proyek infrastruktur dari Huawei, Tiongkok mengekspresikan hubungannya dengan Papua Nugini melalui Hubungan Investasi dan perdagangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari *China Power* menuliskan bahwa Investasi Tiongkok kepada Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar \$1,418 Miliar (China Power, 2017) sedangkan hubungan dagangnya jika ditinjau dari ekspor Tiongkok ke Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar \$2,406 Miliar dengan produk ekspor terdiri dari Peralatan Penyiaran, ban karet, senyawa kimia *sodium* dan *potasium peroxide*, kapal kargo dan penumpang ke Papua Nugini (The Observatory of Economic Complexity, 2017). Sedangkan, jika ditinjau dari Impor Tiongkok ke Papua Nugini, maka sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar \$5,17 Miliar dimana Tiongkok mengimpor minyak dan gas bumi, kayu, nikel, tembaga dan logam mulia dari Papua Nugini (The Observatory of Economic Complexity, 2017).

Maka, untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok tersebut maka Australia mengaplikasikan *economic strengthening* dengan melakukan ekspor, impor dan investasi di Papua Nugini lebih banyak daripada Tiongkok. Jika ditinjau dari nominal ekspor, sejak tahun 2015-2018 nilai ekspor Australia terhadap Papua Nugini bernilai \$5,649 Miliar (The Observatory of Economic Complexity,

2017; Australian Government:Department of Foreign Affairs and Trade, 2019) sedangkan Ekspor Tiongkok ke Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 sebesar \$2,406 Miliar (The Observatory of Economic Complexity, 2017). Dari segi impor, nilai impor Australia terhadap Papua Nugini sejak tahun 2015-2018 bernilai sebesar \$10,951 Miliar (The Observatory of Economic Complexity, 2017; Australian Government:Department of Foreign Affairs and Trade, 2019) sedangkan nilai impor Tiongkok terhadap Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 bernilai sebesar \$5,17 (The Observatory of Economic Complexity, 2017) Jika ditinjau dari segi Investasi, maka nilai Investasi Australia di Papua Nugini sejak tahun 2015-2018 bernilai \$37 Miliar (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2016; Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2018). Sedangkan nilai investasi Tiongkok di Papua Nugini sejak tahun 2015-2017 bernilai \$1,418 Miliar (China Power, 2017).

3.3.4 Kerjasama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik sebagai

Economic Strengthening Australia dalam mengimbangi Pengaruh Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini

Berdasarkan data dari *Lowy Institute* (2018), Proyek Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini dari tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut (Lowy Institute, 2018).

Tabel 3. 3 Proyek Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini dari tahun 2015-2018

Tahun	Nama Proyek	Biaya	Sektor	Keterangan
2012 di mulai	<i>Waigani Convention</i>	USD 3.96 juta	Infrastruktur lainnya	100% selesai

2015 ditunda 2016 peresmian	<i>Centre</i>			
2015	<i>Pacific Marine Industrial Zone</i>	USD 11.83 Juta	Industri, Pertambangan dan Konstruksi	100% selesai
2016	<i>Pacific Marine Industrial Zone</i>	USD 9.19 juta	Industri, Pertambangan dan Konstruksi	100% selesai
2015	<i>Western Pacific University</i>	USD 25.35 juta	Pendidikan	0% progres
2016	<i>New Ensa Provincial Hospital</i>	USD 162.64	Kesehatan	0% progres
2016	<i>Community College</i>	USD 9.27 Juta	Pendidikan	100% selesai
2017	<i>Telikom(PNG) Limited</i>	USD 1.52 juta	Komunikasi	100% selesai
2017	<i>50-MW Edevu Hydropower Project</i>	USD 217.60 juta	Energi	0% progres
2017	<i>High Priority Economic Road Project</i>	USD 3.50 miliar	Transportasi	0% progres
2017	<i>Pacific Marine Industrial Zone</i>	USD 1.52 juta	Industri, Pertambangan dan Konstruksi	100% selesai
2017	<i>Garoka Town Water Supply</i>	USD 32 juta	Air dan Sanitasi	0% progres
2017	<i>Integrated Agricultural Industrial parks in Western Highlands and Eastern Highlands</i>	USD 330 juta	Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan	0% progres
2017	<i>Kokopo Town Sewerage</i>	USD 1.65 juta	Air dan Sanitasi	100% selesai

2017	<i>National Broadband Network</i>	USD 50.94 juta	Komunikasi	100% selesai
2018	<i>132KV Transmission Lines</i>	USD143.07	Energi	0% progres

Maka *Economic Strengthening* Australia adalah membangun sebuah blok perdagangan yang beranggotakan AS dan Jepang. Blok perdagangan tersebut berjudul Kerjasama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik (*Trilateral Partnership for Infrastructure investment in the Indo-Pacific*).

Kerjasama Trilateral untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik memiliki mandat untuk memajukan pembangunan infrastruktur yang memberdayakan masyarakat dan mematuhi standar global. Pembangunan yang bersifat berkelanjutan yang mematuhi standar sosial, buruh dan lingkungan, memastikan transparansi dan menciptakan peluang ekonomi untuk semua termasuk perempuan dan pekerja lokal yang menghormati kedaulatan nasional tuan rumah (Export Finance Australia, 2019).

Pada tanggal 12 November, beberapa pihak telah menandatangani MoU. Pihak tersebut berasal dari Departemen Urusan Luar Negeri Perdagangan Australia, *Export Finance and Insurance Corporation (EFIC)*, *the Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*, dan *the U.S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC)*. Kerjasama trilateral tersebut bertujuan untuk membangun proyek infrastruktur, meningkatkan konektivitas digital dan infrastruktur energi. Kerjasama Trilateral ini akan berkonsultasi dengan

berbagai negara di Indo-Pasifik termasuk Papua Nugini (Prime Minister of Australia, 2018).

Pada bulan April 2019, ketiga negara telah berkunjung ke Papua Nugini. Mereka berkonsultasi dengan pemerintah, sektor swasta dan sektor relevan lainnya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi proyek infrastruktur yang berpotensi dibangun dan dibiayai bersama (Export Finance Australia, 2019).

Australia sebagai bagian dari anggota kerjasama trilateral telah berkomitmen akan memberikan dana Papua Nugini dan Indo-Pasifik secara keseluruhan. Pada bulan Juli, agensi keuangan yang melayani secara finansial eksportir Australia kepada konsumennya di Pasifik dan luar Indo-Pasifik yakni EFIC telah mengembangkan mandatnya dengan membuat *Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific (AIFFP)* (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2019).

AIFFP berfungsi sebagai penyedia jasa jaminan dan pinjaman untuk proyek infrastruktur seperti telekomunikasi, energy, transportasi, akses air dan infrastruktur prioritas lainnya di Pasifik dan Timor Leste (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2019). Dana yang ada didalamnya sekitar US\$ 2 miliar yang terdiri dari dana hibah dan pinjaman (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2019). Berikut jangka waktu dan kegiatan dari kerjasama trilateral Australia, Jepang dan AS di Papua Nugini

Tabel 3. 4 Jangka waktu dan kegiatan dari kerjasama trilateral Australia, Jepang dan AS di Papua Nugini

Kegiatan	Waktu	Keterangan
Penandatanganan MoU	12 November 2018	Selesai
Identifikasi Proyek Potensial di Papua Nugini	April 2019	Selesai
Pembentukan AIFFP	Juli 2019	Selesai

3.4 Aplikasi *Signals of Resolve to Balance* sebagai Upaya Mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini

Signals of Resolve to Balance, Pape menjelaskan bahwa strategi ini dan keseluruhannya adalah permainan koordinasi dimana berkoordinasi secara timbal balik untuk menentang kebijakan negara superior atau negara yang mengancam. Jika beberapa negara dapat bekerjasama dan berulang ulang melakukan beberapa indikator lainnya yakni *territorial denial*, *entangling diplomacy* dan *economic strengthening*, maka mereka secara bertahap meningkatkan rasa saling percaya untuk bekerjasama melawan ambisi pemimpin negara lawan.

Berdasarkan penelitian ini, Australia telah melakukan indikator *signals of resolve to balance*. Hal ini didasarkan berbagai akumulasi pengaruh Tiongkok di Papua Nugini (Motegi, 2019). Pada sub bab ini akan menjelaskan dua pengaruh

Tiongkok di Papua Nugini. Pertama kerjasama militer Tiongkok dan Papua Nugini. Kedua adalah Pengaruh Tiongkok melalui Proyek Infrastruktur di Papua Nugini.

3.4.1 Inisiasi Bersama Lombrum sebagai *Signals of Resolve to Balance*

Australia dalam Mengimbangi Kerjasama Militer antara Tiongkok dan Papua Nugini

Berikut beberapa *high visit diplomacy* antara Tiongkok dan Papua Nugini dari segi militer. Pada tanggal 3 November 2017, Duta besar Tiongkok untuk Papua Nugini, Xue Bing diundang untuk menghadiri serah terima bantuan Tiongkok akan kendaraan militer baru kepada Papua Nugini. Menurut Xie Bing, Tiongkok telah membantu berkontribusi dalam hal infrastruktur dan peningkatan kapasitas tentara Papua Nugini sehingga harapannya hubungan militer antar keduanya semakin kuat (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2017). Berdasarkan penjelasan *engagement* dari segi militer antara Tiongkok dan Papua Nugini, maka dapat penulis analisis bahwa *engagement* tersebut studi kasus untuk menjabarkan Teori Ancaman Tiongkok yakni ia menggunakan berbagai kekuatannya baik itu *high visit diplomacy*, untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Pasifik.

Pada tanggal 26 Juli 2018, Papua Nugini dan Tiongkok telah menandatangani perjanjian kerjasama militer. Dimulai dengan kunjungan kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok (*Chinese Navy's "Square Boat" hospital ship*) sebagai *ceremonial* untuk menandai hubungan militer antar keduanya. Kapal tersebut digunakan untuk layanan medis kemanusiaan kepada Papua

Nugini (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2018) (Motegi, 2019).

Maka bentuk *signals of resolve to balance* adalah Australia melakukan inisiasi yakni melanjutkan kerjasama melalui pengembangan ulang Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus, Papua Nugini. Pada tanggal 1 November 2018, PM Scott Morrison dan O'Neill mengumumkan secara resmi dibentuknya sebuah inisiasi yakni Inisiasi Bersama Lombrum atau lebih dikenal dengan *The Lombrum Joint Initiative* (Prime Minister of Australia, 2018).

Selain itu, AS sebagai sekutu Australia juga memiliki niat untuk bergabung dalam inisiasi tersebut. Hal ini dinyatakan langsung oleh Wakil Presiden AS, Mike Pence pada saat konferensi tingkat tinggi APEC di Papua Nugini pada tanggal 16 November 2018. Pada saat konferensi berlangsung, Mike Pence mengumumkan bahwa akan bergabung dengan inisiasi tersebut (Mike Pence, 2018).

Berdasarkan penggambaran kerjasama tersebut, penulis menganalisis bahwa Ancaman Tiongkok di respon oleh kegiatan *Signals of resolve to balance* oleh Australia dan AS melalui komitmen mereka bekerjasama dalam pengembangan Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum tersebut. Hal ini dapat disesuaikan dengan defenisninya bahwa jika beberapa negara dapat bekerja sama, dan berulang kali maka dapat meningkatkan kepercayaan antar mereka dalam rangka untuk melawan ambisi pemimpin negara lawan.

Untuk memperkuat analisis *signals of resolve to balance*, Australia bersama negara lain yakni AS dan negara *second ranked powers* yakni Jepang dan Papua Nugini melakukan *soft balancing* secara berulang ulang. Kerjasama tersebut dapat ditinjau dari upaya Australia dan AS terhadap pembangunan Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum. Selain itu, Upaya Australia, AS dan Jepang dalam melakukan *entangling diplomacy* dengan menggunakan ASEAN sebagai *manuver* diplomatik dalam rangka mengimbangi posisi Tiongkok di sengketa Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, Australia dan Papua Nugini dan Kepulauan Solomon membangun sebuah blok perdagangan melalui *Seasonal Workers Program*. Dan, AS dan Jepang turut bekerjasama dengan Australia untuk mengimbangi Pengaruh Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini melalui Kerjasama Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Australia telah mengaplikasikan tiga dari empat indikator *soft balancing*. Ketiga indikator tersebut adalah *entangling diplomacy*, *economic strengthening* dan *signals of resolve to balance* telah diaplikasikan untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini sepanjang tahun 2015 hingga 2019.

Aplikasi *soft balancing* didorong oleh kepentingan ekonomi, isu keamanan dan kepentingan domestik dalam mengimbangi negara rival atau potensial menjadi musuh. Dengan demikian berdasarkan konsep *soft balancing* maka Tiongkok dianggap sebagai pemain yang berpotensi menjadi musuh karena berbagai pengaruh yang terjadi baik dari segi keamanan dan militer, bantuan luar negeri dan politik.

Berpotensi menjadi musuh bukan menjadi musuh sesungguhnya juga disebabkan oleh Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini belum mengancam secara tegas akan posisi Australia sebagai *hegemonic power* di Papua Nugini. Tiongkok belum melakukan tindakan agresif seperti perang atau membangun pangkalan militer di Papua Nugini.

Namun atas dasar teori ancaman Tiongkok (*China Threat Theory*) yang mengagas tentang bahaya Tiongkok yang muncul mulai dari ancaman militer, ekonomi dan lain lain serta fakta bahwa pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang ada dari tahun ke tahun sehingga pengaruh Tiongkok berpotensi mengancam

Australia sebagai *hegemonic power* di Papua Nugini. Untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok tersebut maka Australia mengimbangi Tiongkok dengan cara mengaplikasikan *soft balancing* dalam rangka mengimbangi pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019.

Berbagai ancaman Tiongkok yang telah Australia imbangi adalah mulai dari ancaman siber, ancaman hubungan militer antara Tiongkok dan Papua Nugini, ancaman ekonomi dan ancaman kepentingan lainnya atau ancaman tekanan publik kepada pemerintah Papua Nugini untuk mendukung posisi Tiongkok di sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Berikut rangkuman aplikasi *Soft Balancing* Australia terhadap pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019.

- Aplikasi *Territorial Denial*

Australia tidak mengaplikasikan *territorial denial* kepada Tiongkok meskipun adanya pementasan angkatan darat dan laut Tiongkok di Papua Nugini baik itu pemberian alat militer angkatan darat yang bernilai sebesar USD 5.34 juta (Lowy Institute, 2018) dan kunjungan kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok (*Chinese Navy's "Square Boat" hospital ship*) sebagai *ceremonial* untuk menandai hubungan militer antar keduanya (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2018) (Motegi, 2019).

- Aplikasi *Entangling Diplomacy*

Australia mengaplikasikan *entangling diplomacy* disebabkan oleh pengaruh Tiongkok dari segi politik. Pengaruh tersebut terjadi pada tahun 2016 ketika pemerintah Tiongkok melakukan tekanan publik agar Pemerintah Papua Nugini dan pemerintah lain di kawasan Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Sehingga Papua Nugini pun mendukung Posisi Tiongkok dalam sengketa laut Tiongkok Selatan.

Padahal, aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan memasuki tahap yang membahayakan seperti pembangunan konstruksi yang menciptakan bentrokan dengan berbagai pihak. Bentrokan dengan berbagai pihak tersebut yakni nelayan, penjaga pantai dan kerusakan aset laut. Dengan demikian Australia yang mendukung tatanan global berdasar hukum di Indo-Pasifik mengalami tekanan yang signifikan.

Dengan demikian, Australia melakukan *entangling diplomacy* dengan menggunakan norma institusi untuk menunda, memperumit dan mencegah ambisi Tiongkok Laut Tiongkok Selatan dengan cara mengumumkan pernyataan bersama dengan dua negara lain, AS dan Jepang. Pernyataan tersebut bersisi desakan agar Tiongkok mematuhi keputusan arbitrase Konvensi PBB tentang hukum laut (*UNCLOS*) tahun 2016.

- Aplikasi *Economic Strengthening*

Australia mengaplikasikan *economic strengthenig* disebabkan oleh pengaruh bantuan luar negeri Tiongkok kepada Papua Nugini dan pengaruh keamanan. Berbagai bantuan yang telah diberikan sejak tahun 2015-2018.

Sehingga untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok tersebut adalah dengan melaksanakan program *Seasonal Workers Program* sebagai wujud dari pembentukan blok perdagangan tanpa adanya Tiongkok di dalamnya.

Aplikasi lain yang dapat dikategorikan sebagai *economic strengthening* adalah pengaruh Tiongkok dari segi keamanan. Keikutsertaan Huawei dimana perusahaan yang dilarang berporasi di Australia kini membangun sebuah *National Broadband Network* di Papua Nugini.

Sehingga bentuk *Economic Strengthening* Australia untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok adalah membangun kerjasama Sistem Kabel Laut Koral (*Coral Sea Cable System*). Kerjasama ini masuk dalam indikator *Economic Strengthening* karena kerjasama hanya dianggotai oleh tiga negara yakni Australia, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon tanpa Tiongkok.

Selain itu, Australia juga mengimbangi ancaman Tiongkok dari segi Pengaruh ekonomi yakni hubungan ekspor, impor dan investasi. Sehingga untuk megimbanginya, secara bilateral Australia dan Papua Nugini telah membangun sebuah blok perdagangan tanpa Tiongkok dimana Australia meningkatkan hubungan ekspor, impor dan investasi di Papua Nugini lebih banyak dibandingkan hubungan ekspor, impor dan investasi Tiongkok di Papua Nugini.

Selain pengaruh ekonomi, ternyata pengaruh Tiongkok dari segi proyek infrastruktur juga dapat melahirkan upaya *economic strengthening*. Berbagai proyek infrastruktur baik yang sudah selesai dan dalam proses pembangunan. Maka

economic strengthening Australia adalah bekerjasama dengan AS dan Jepang dengan membentuk Kerjasama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik (*Trilateral Partnership for Infrastructure investment in the Indo-Pacific*). Kerjasama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik memiliki mandat untuk memajukan pembangunan infrastruktur yang memberdayakan masyarakat dan mematuhi standar global dan meningkatkan peluang ekonomi.

- Aplikasi *Signals of Resolve to Balance*

Aplikasi *signals of resolve to balance* Australia dalam mengimbangi Tiongkok disebabkan oleh Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini dari segi keamanan dan ekonomi. Pengaruh keamanan Tiongkok di Papua nugini seperti pemberian bantuan peralatan militer kepada Papua Nugini pada tahun 2017 dan kunjungan kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok di Papua Nugini dan juga pengaruh operasi kapal non militer yang melintasi laut diantara pangkalan militer Lombrum dan pangkalan militer angkatan laut AS di pulau Guam merupakan berbagai pengaruh dari segi keamanan.

Maka Australia mengaplikasikan *signals of resolve to balance* adalah dengan bekerjasama dengan negara lain yakni AS. Berdasarkan penggambaran kerjasama tersebut, penulis menganalisis bahwa ancaman Tiongkok di respon oleh kegiatan *signals of resolve to balance* oleh Australia dan AS melalui komitmen mereka bekerjasama sama dalam pengembangan Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus, Papua Nugini. Hal ini dapat disesuaikan dengan defenisninya bahwa jika beberapa negara dapat bekerja sama, dan berulang kali maka dapat meningkatkan

kepercayaan antar mereka dalam rangka untuk melawan ambisi pemimpin negara lawan.

Untuk memperkuat analisis *signals of resolve to balance*, Australia bersama negara lain yakni AS dan negara *second ranked powers* yakni Jepang dan Papua Nugini melakukan *soft balancing* secara berulang ulang. Kerjasama tersebut dapat ditinjau dari upaya Australia dan AS terhadap pembangunan Pangkalan Militer Angkatan Laut Lombrum. Selain itu, Upaya Australia, AS dan Jepang dalam melakukan *entangling diplomacy* dengan menggunakan ASEAN sebagai *manuver* diplomatik dalam rangka mengimbangi posisi Tiongkok di sengketa Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, Australia dan Papua Nugini dan Kepulauan Solomon membangun sebuah blok perdagangan melalui *Seasonal Workers Program*. Dan, AS dan Jepang turut bekerjasama dengan Australia untuk mengimbangi Pengaruh Infrastruktur Tiongkok di Papua Nugini melalui Kerjasama Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini hanya membatasi studi kasus terhadap Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang berpotensi mengancam Australia. Penelitian dengan cakupan mulai dari 2015-2019 dengan dua rezim pemerintahan yakni mantan PM Malcolm Turnbull pada tahun 2015-2018 dan awal pemerintahan PM Scott Morrison pada tahun 2019. Dengan demikian untuk mengimbangi negara yang berpotensi mengancam maka penelitian ini menganalisis segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia menggunakan konsep *Soft Balancing* oleh Robert A. Pape.

Namun, penelitian ini memiliki kekurangan. Sehingga penulis memberikan saran dan rekomendasi agar penelitian selanjutnya dapat meneliti aplikasi *Soft Balancing* Australia terhadap pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada masa selain 2015-2019 atau selain rezim PM Malcolm Turnbull dan Scott Morrison. Terutama meneliti aplikasi *soft balancing* pada masa rezim yang dipegang oleh Partai Buruh. Karena setiap rezim yang dipimpin oleh rezim partai buruh atau liberal memiliki perbedaan dalam mengeluarkan setiap kebijakan luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ai, X. (2016). An Intertextual Analysis of the Formation of “China Threat Theory”. *Social Science, Education and Humanities Research*, 92, 453.
- AP News. (2018, September 28). *US, Japan and Australia challenge Huawei in Papua New Guinea*. Retrieved August 12, 2019, from AP News: <https://www.apnews.com/b9d70f90f0524e038ec4eee69686dfcf>
- Art, R., Brooks, S., Wohlfort, W., Lieber, K., & Alexander, g. (2006). Correspondance: Striking the Balance. *International Security*, 183-84.
- ASEAN. (2001). *ASEAN – China Free Trade Agreements*. Retrieved from <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/21/asean-china-fta-id0-1356076310.pdf>
- Australian Government. (2013). *Defence White Paper 2013*. Australia Government, Department of Defence. Commonwealth of Australia 2013. Retrieved Juni 27, 2019, from http://www.defence.gov.au/whitepaper/2013/docs/WP_2013_web.pdf
- Australian Government. (2017, Juni 24). *2017 Foreign Policy White Paper*. Retrieved from <https://www.fpwhitepaper.gov.au/>
- Australian Government: Department of Defence. (2019, Maret 21). *Australia and Papua New Guinea Sign Lombrum Joint Initiative MOU*. Retrieved Juli 10, 2019, from Australian Government: Department of Defence: <https://www.minister.defence.gov.au/minister/cpyne/media-releases/australia-and-papua-new-guinea-sign-lombrum-joint-initiative-mou>
- Australian Government: Department of Employment, Skills, Small and Family Business. (2019, April 11). *Seasonal Workers Program*. Retrieved August 19, 2019, from Australia Government: Department of Employment, Skills, Small and Family Business: <https://www.employment.gov.au/seasonal-worker-programme>

- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. (2019, July 7). *The Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific (AIFFP) will support transformative infrastructure in the region*. Retrieved August 15, 2019, from Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade: <https://www.aiffp.gov.au/>
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. (2016, September). *Aid Program Performance Report 2015-2016: Papua New Guinea*. Retrieved September 3, 2019, from Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade: <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/papua-new-guinea-appr-2015-16.pdf>
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. (2017, September). *Aid Program Performance Report 2016-2017*. Retrieved September 3, 2019, from Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade: <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/papua-new-guinea-appr-2016-17.pdf>
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. (2018, September). *Aid Program Performance Report 2017-2018; Papua New Guinea*. Retrieved September 1, 2019, from Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade: <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/papua-new-guinea-appr-2017-18.pdf>
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. (2018, Desember 5). *Papua New Guinea and Australia: a broad and enduring partnership infographic*. Retrieved Juli 31, 2019, from Australia Government: Department of Foreign Affairs and Trade: <https://dfat.gov.au/geo/papua-new-guinea/development-assistance/Pages/papua-new-guinea-and-australia-a-broad-and-enduring-partnership-infographic.aspx>
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. (2019, July 1). *Pacific Regional—Australian Infrastructure Financing Facility for the*

Pacific. Retrieved August 13, 2019, from Australian Government:
Department of Foreign Affairs and Trade:
<https://dfat.gov.au/geo/pacific/development-assistance/Pages/australian-infrastructure-financing-facility-for-the-pacific.aspx>

Australian Government:Defence White Paper. (2016). *2016 Defence White Paper*.
Australia Government, Department of Defence. Commonwealth of Australia
2016. Retrieved Juni 27, 2019, from
<http://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-Defence-White-Paper.pdf>

Australian Government:Department of Employment, Skills,Small and Family
Business. (2019, July 4). Retrieved Juli 31, 2019, from Australia Government:
Department of Employment, Skills,Small and Family Business:
<https://www.employment.gov.au/seasonal-worker-programme>

Australian Government:Department of Foreign Affairs and Trade. (2019, April 26).
Papua New Guinea. Retrieved Juli 31, 2019, from Australian Government:
Department of Foreign Affairs and Trade:
<https://dfat.gov.au/trade/resources/Documents/png.pdf>

Ben Bapham. (2018, Juli 12). *China's more flexible support better than Australia's, says PNG*. Retrieved Juli 30, 2019, from The Australian:
<https://www.theaustralian.com.au/nation/foreign-affairs/chinas-more-flexible-support-better-than-australias-says-png/news-story/c5c0ad5f5a0dead450f595ce84886b5d>

Berteau, D. J., Green, M. J., & Cooper, Z. (2014). *Assessing the Asia-Pacific Rebalance*. Washington DC: Center for Strategic & International Studies.
Retrieved Juni 2, 2019, from https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/150105_Berteau_AssessingAsiaPacificRebal_Web.pdf

- Bertrand, M. (1995). The UN as an Organization. A Critique of its Functioning. *European Journal of International Law, Issue Vol. 6 (1995) NO. 1*. Retrieved Januari 14, 2019, from <http://www.ejil.org/pdfs/6/1/1301.pdf>
- Bhargava, V. (2016). *Global Issues for Global Citizen: An Introduction to key development challenges*. Washington DC: The World Bank.
- Bishop, J. (2014). *Minister for Foreign Affairs: The Hon Julie Bishop MP*. Retrieved 4 4, 2019, from https://foreignminister.gov.au/speeches/Pages/2014/jb_sp_140618a.aspx
- Brant, P. (2015, Februari). *Papua New Guinea Snapshot*. Retrieved April 20, 2019, from Chinese Aid in the Pacific: Lowy Institute for International Policy: http://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/chinese_aid_in_the_pacific_png_snapshot_0.pdf
- Bromley, D. (1986). *The Case-Study Method in Psychology and Related Disciplines*. Chichester: Wiley.
- Brooks, S. G., & Wohlforth, W. c. (2005). Hard Times for Soft Balancing. *Internatinal Security, 30*(1), 74. Retrieved Maret 21, 2019, from <http://www.jstor.org/stable/4137459>
- Brophy, D. (2019). Australia's China Debate in 2018. In *Power* (p. 155). ANU Press.
- Brown, C. P. (2012). Australian Influence in the South Pacific. *Australian Defence Force Journal*(189), 66-78. Retrieved April 9, 2019, from http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/Commanders/2012/07_Brown%20SAP%20Final%20PDF.pdf
- China Power. (2017). *Does China dominate global investment?* Retrieved from China Power:Unpacking the Complexity of China's Rise: <https://chinapower.csis.org/china-foreign-direct-investment/>

- Choudhury, S. R. (2019, Maret 28). *Former Australian PM Turnbull explains why his government banned Huawei, ZTE from selling 5G equipment*. Retrieved Juli 7, 2019, from CNBC: <https://www.cnbc.com/2019/03/28/malcolm-turnbull-on-australias-decision-to-ban-chinas-huawei-and-zte.html>
- Collinson, E. (2017, November 23). *China in Australia's Foreign Policy White Paper*. Retrieved from https://www.australiachinarelations.org/sites/default/files/20171123%20ACRI%20Facts_China%20in%20Australia's%20Foreign%20Policy%20White%20Paper_0.pdf
- Coral Sea cable System. (2018, October 16). *About the Project*. Retrieved August 12, 2019, from Coral Sea cable System: <https://www.coralseacablesystem.com.au/about/>
- Coral Sea Cable System. (2018, October 16). *Australia, PNG & Solomon Islands sign Trilateral MoU*. Retrieved from Coral Sea Cable System: <https://www.coralseacablesystem.com.au/articles/australia-png-solomon-islands-sign-trilateral-mou/>
- Coral Sea Cable System. (2018, October 16). *Project Milestones*. Retrieved August 12, 2019, from Coral Sea cable System: <https://www.coralseacablesystem.com.au/progress/>
- Corrales, J., & Penfold, M. (2015). Venezuela's New Foreign Policy: Soft-Balancing and Social-Power Diplomacy. In J. Corrales, & M. Penfold, *Dragon in the Tropics* (p. 100). Brookings Intitution Press. Retrieved Maret 21, 2019, from <https://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt7zsw23.9>
- Department of Defense United States of America. (2016). *Annual Report to Congress: Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2018*. Washington D.C: Office of the Secretary of Defence. Retrieved August 8, 2019, from

<https://media.defense.gov/2018/Aug/16/2001955282/-1/-1/1/2018-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT.PDF>

Doherty, B. (2018, Juli 2). China's Aid to Papua New Guinea threatens Australia's Influence. Retrieved April 12, 2019, from <https://www.theguardian.com/world/2018/jul/02/chinas-aid-to-papua-new-guinea-threatens-australias-influence>

Edward A Kalodziej. (1965). Frech Strategy Emergent by General Andre Beaufre: A Critique. *World Politics*, 19, 417. Retrieved Juli 30, 2019, from <https://www.jstor.org/stable/2009786>

Export Finance Australia. (2019, Juni 25). *Trilateral Infrastructure Partnership Joint Statement*. Retrieved August 13, 2019, from Export Finance Australia: <https://www.exportfinance.gov.au/resources-news/news-events/government-news/2019/june/trilateral-infrastructure-partnership-joint-statement/>

Flames, D. (2007, Agustus). Emerging Middle Powers' Soft Balancing Strategy: State and Perspectives of the IBSA Dialogue Forum. *Giga Working Papers*, 57, 17. Retrieved Maret 2019, 31, from <https://www.giga-hamburg.de/en/publication/emerging-middle-powers%E2%80%99-soft-balancing-strategy-state-and-perspectives-of-the-ibsa>

Frei, D. H. (2019, Juni 26). *Remembering the war in New Guinea Why the Japanese were in New Guinea (Symposium paper)*. Retrieved from Australian-Japan research Project: <http://ajrp.awm.gov.au/AJRP/remember.nsf/Web-Printer/D879E4837E327092CA256A99001B7456?OpenDocument>

Gao, C. (2017, August 9). *US, Australia, Japan Jointly Challenge China on South China Sea Issue*. Retrieved August 9, 2019, from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/08/us-australia-japan-jointly-challenge-china-on-south-china-sea-issue/>

- GFP. (2019). 2019 Military Strength Ranking(BETA). Global Fire Power. Retrieved Maret 3, 2019, from <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>
- Gill, B. (2007). *Rising Star: China's New Security Diplomacy*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Gillard, J. (2011, November 16). *Remarks by President Obama and Prime Minister Gillard*. Retrieved from us force posture strategy in the asia pacific region an independent assessment
- Gordon, M. R. (2003, January 9). *Threat and Responses: The Allies; Turkey's Reluctance on Use of Bases Worries U.S.* Retrieved August 7, 2019, from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2003/01/09/world/threats-and-responses-the-allies-turkey-s-reluctance-on-use-of-bases-worries-us.html>
- Greene, A. (2019, April 21). *Chinese Surveillance near PNG Expanding as Australia and US begin Manus Island Naval Upgrades*. Retrieved Juli 31, 2019, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2019-04-21/china-increases-surveillance-near-png/11028192>
- Hanson, F., & Fifita, M. (2011). *Policy Brief: China in the Pacific: The New Banker in Town*. Sidney: Lowy Institute for International Policy. Retrieved April 21, 2019, from https://www.files.ethz.ch/isn/129898/Hanson%20and%20Fifita,%20China%20in%20the%20Pacific_web.pdf
- Harvey, G. (2018, Juni 18). The China Syndrome. *The China Syndrome: Part One- Is China Taking Over South Pacific*. Retrieved April 8, 2019, from <https://www.youtube.com/watch?v=AGl3HxEMJhI>
- Haug, S. (2017). Exploring 'Constructive Engagement': MIKTA and Global Development. *Rising Power Quarterly*, 1.
- Hayward-Jones, J. (2013, May 16). *'Big Enough for All of Us: geo-strategic competition in the Pacific Islands*. Retrieved from Lowy Institute for

International Policy website:

<https://twitter.com/search?f=realtime&q=http%3A%2F%2Fwww.lowyinstitute.org%2Fpublications%2Fbig-enough-all-us-geo-strategic-competition-pacific-islands>

He, K., & Feng, H. (2008, Juni 14). If Not Soft blancing, Then What? Reconsidering Soft Balancing and U.S Policy Toward China. *Security Studies*, 363-395.
doi:10.1080/09636410802098776

Hegarty, G. C. (2015, Maret). *China's Growing Influence in the South-West pacific: Australian Policies that could respond to China's Intenions and Objectives*. Retrieved April 3, 2019, from The Centre for Defence and Strategic Studies: [http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/IndoPac/150327%20Hegarty%20IPS%20Paper%20China's%20Growing%20Influence%20in%20SWP%20\(final%20PDF%20amended\).pdf](http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/IndoPac/150327%20Hegarty%20IPS%20Paper%20China's%20Growing%20Influence%20in%20SWP%20(final%20PDF%20amended).pdf)

Henderson, J., Reilly, B., & Peffer, N. (2003). *Dragon in Paradise: China's Rising Star in Oceania*. Retrieved from Crawford School of Public Policy - ANU: https://crawford.anu.edu.au/pdf/staff/ben_reilly/breilly1.pdf

Herr, R. (2019). *Special Report: Chinese Influence in the Pacific island The Yin and Yang of Soft Power*. Australia: ASPI: Australian Strategic Policy Institute. Retrieved Juni 3, 2019, from <https://www.aspi.org.au/report/chinese-influence-pacific-islands>

Hill, C. (2016, July 27). *Australia and the South China Sea: debates and dilemmas*. Retrieved August 8, 2019, from Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook45p/SouthChinaSea

Hill, M. (2010). Chessboard or 'Political Bazaar'? Revisiting Beijing, Canberra and Wellington's Engagement with the South Pacific. *Security Challenges*. Retrieved Juli 27, 2019, from <https://www.jstor.org/stable/26459798>

- Hoadley, S. (2005). Pacific Island Security Management by New Zealand and Australia. *The Centre for Strategic Studies: New Zealand*, 10. Retrieved April 10, 2019, from <https://www.victoria.ac.nz/strategic-studies/documents/working-papers/wp-20.pdf>
- Hollingsworth, J. (2019, July 22). *Why China is challenging Australia for influence over the Pacific Islands*. Retrieved August 1, 2019, from CNN World: <https://edition.cnn.com/2019/07/22/asia/china-australia-pacific-investment-intl-hnk/index.html>
- Holmes, A. (2013, April 15). *Australia's economic relationships with China*. Retrieved September 2, 2019, from Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook44p/China
- Huang, K. (2017, November 23). *Australia looks for balance to China's rising power in Indo-Pacific region*. Retrieved July 31, 2019, from South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2121245/australia-looks-balance-chinas-rising-power-indo>
- Huawei. (2016, Oktober 11). *Huawei Marine Helps Papua New Guinea Build a National Broadband Transmission Network*. Retrieved July 8, 2019, from Huawei: News: <https://www.huawei.com/en/press-events/news/2016/10/Huawei-PapuaNewGuinea-Broadband-Transmission-Network>
- Hurrel, A. (2000). Some Reflections on the Role of Intermediate Powers in International Institution. *Paths to Power: Foreign Policy Strategies of Intermediate States, Working Paper No 244*, 4. Retrieved from <http://www.corteidh.or.cr/tablas/15011.PDF>
- Hutchens, G. (2018, Oktober 30). *Huawei poses security threat to Australia's infrastructure, spy chief says: Australian Signals Directorate chief says using 'high-risk vendor equipment' could pose threat to water supply and electricity*

- grid*. Retrieved Juli 7, 2019, from The Guardian:
<https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/30/huawei-poses-security-threat-to-australias-infrastructure-spy-chief-says>
- International Monetary Fund. (2018, March 12). *List of LIC DSAs for PRGT-Eligible Countries As of July 16, 2019*. Retrieved August 2, 2019, from International Monetary Fund: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/dsalist.pdf>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2012). *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford Express.
- Jones, J. H. (2017, Desember 6). *Changing Geopolitical Dynamics for Papua New Guinea*. Retrieved Mei 30, 2019, from Lowy Institute:
<https://interactives.lowyinstitute.org/archive/png-in-2017/png-in-2017-changing-geopolitical-dynamics-for-papua-new-guinea.html>
- Joske, A. (2018). *Picking Flower, Make Honey: The Chinese Collaboration with Universities*. Australian Strategic Policy Institute. Retrieved from https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ad-aspi/2018-10/Picking%20flowers%2C%20making%20honey_0.pdf?H5sGNaWXqMgTG_2F2yZTQwDw6OyNfH.u
- Julie Bishop. (2018, July 2). *China's aid to Papua New Guinea threatens Australia's influence*. Retrieved August 2, 2019, from The Guardian:
<https://www.theguardian.com/world/2018/jul/02/chinas-aid-to-papua-new-guinea-threatens-australias-influence>
- Kang, D. C. (2007). *China Rising: Peace, Power, and Order in East Asia*. New York: Colombia University Press.
- Kharpal, A. (2018, Agustus 23). *Huawei and ZTE banned from selling 5G equipment to Australia*. Retrieved Juli 7, 2019, from CNBC:
<https://www.cnbc.com/2018/08/23/huawei-and-zte-banned-from-selling-5g-equipment-to-australia.html>

- Krause, N. (2007). The Rise of China in the Pacific. *State, Society and Government*.
- Kuo, S. (2015, Juli 8). China's Investment In Africa - The African Perspective. Retrieved April 3, 2019, from <https://www.forbes.com/sites/riskmap/2015/07/08/chinas-investment-in-africa-the-african-perspective/#20d286af16e2>
- Lanteigne, M. (2012). Water Dragon? China, power shift and soft balancing in South Pacific. *Political Science*, 31.
- Lanteigne, M. (2012). Water Dragon? China, Power Shift and Soft Balancing in the South Pacific. *Political Science*, 21-65.
- Lieber, K. A., & Alexander, G. (2005). Waiting for Balancing : Why the World is Not Pushing Back. *International Security*, 109-139.
- Liu, N. (2017, September 8). *Toward a Code of Conduct for the South China Sea: What Happens next?* Retrieved August 9, 2019, from Asia and The Pacific Policy Society: <https://www.policyforum.net/towards-code-conduct-south-china-sea/>
- Lowy Institute. (2017, Desember 6). *Changing Geopolitical Dynamics for Papua New Guinea*. Retrieved Mei 30, 2019, from Lowy Institute: <https://interactives.lowyinstitute.org/archive/png-in-2017/png-in-2017-changing-geopolitical-dynamics-for-papua-new-guinea.html>
- Lowy Institute. (2018). *Lowy Institute Pacific Aid Map*. Retrieved April 19, 2019, from Lowy Institute: <https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/>
- Lowy Institute. (2018). *Lowy Institute Pacific Aid Map: Australia*. Retrieved August 2, 2019, from Lowy Institute Pacific Aid Map: <https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/>
- Marles, R. (2014, Mei 29). *Radio Australia "Pacific Beat" – Interview with Girish Sawlani*, *Interview of Australian Parliamentary Secretary for Pacific Island*

affairs. Retrieved April 3, 2019, from
http://ministers.dfat.gov.au//marles/transcripts/Pages/2012/rm_tr_120529.aspx?ministerid=4#c

McDougall, D. (2011, November 4). Response to " Rising China" in The East Asian Region: Soft Balancing with Accommodation. *Journal of Contemporary China*, 15. doi:10.1080/10670564.2012.627662

McDougall, D. (2014). Australian Strategies in Response to China's Rise: The Relevance of United States. *Asian Survey*, 330-331.

McDougall, D. (2007, Desember). Intervening in the Neighbourhood: Comparing Australia's Role in east Timor and The South Pacific. *International Journal*, 62(4), 868. doi:<http://dx.doi.org/10.1177/002070200706200409>

McKenna, M. (2014, May 20). *Time for Australia to Rethink Chinese Influence in Pacific Islands*. Retrieved from Pacific Island Society Website:
<http://pacificislandssociety.com/fieldnotes/chinese-offer-pacific-island-countries-choice/>

Medcalf, R. (2018). Australia's Foreign Policy White Paper: Navigating Uncertainty in the Indo-Pacific. *Security Challenges*, 14, 33. Retrieved Juni 7, 2019, from <https://www.jstor.org/stable/26488489>

Mike Pence. (2018, November 16). *Remarks by Vice President Pence at the 2018 APEC CEO Summit | Port Moresby, Papua New Guinea*. Retrieved Juli 10, 2019, from White House: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-2018-apec-ceo-summit-port-moresby-papua-new-guinea/>

Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2016, Juli 7). *Joint Press Release of the People's Republic of China and the Independent State of Papua New Guinea (Full Text)*. Retrieved Mei 30, 2019, from Minister of

Foreign Affairs of the People's Republic of China:
<https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1378392.shtml>

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2017, November 6). *Xue Bing, Ambassador of Papua New Guinea, attended the handover ceremony of China's aid to the new military vehicles*. Retrieved Juli 10, 2019, from Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China:
https://www.fmprc.gov.cn/web/zwbd_673032/wshd_673034/t1507806.shtml

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2018, Juli 26). *China and Papua New Guinea signed a military cooperation agreement*. Retrieved Juli 7, 2019, from Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China:
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/zwbd_674895/t1580543.shtml

Motegi, T. (2019, Maret 26). *Don't Underestimate China's Political Influence on Papua New Guinea*. Retrieved Maret 10, 2019, from cogitASIA: A Blog of CSIS Asia Program: <https://www.cogitasia.com/dont-underestimate-chinas-political-influence-on-papua-new-guinea/>

O'Dowd, S. (2018, Agustus 21). *Power Plays in the Pacific*. Retrieved Juni 7, 2019, from East Asia Forum: Economic, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific: https://www.eastasiaforum.org/2018/08/21/power-plays-in-the-pacific/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2018-08-26

Oswald, F. (2006). Soft Balancing Between Friends: Transforming Transatlantic Relation. *Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*, 147.

Pape, R. A. (2005). Soft Balancing Against the United States. *International Security*, 7-45.

- Parliament of Australia. (2013, April 15). *Chapter 10-Southwest Pacific*. Retrieved from Parliament of Australia:
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/Completed_inquiries/2004-07/china/report02/c10
- Paul, T. (2005). Soft Balancing in the Age of US Primacy. *International Security*, 30(1), 58.
- Paul, T. V. (2018). *Restraining Great Power: Soft Balancing from Empires to the Global Era*. United States of America: Yale University Press.
- Paul, T., Wirtz, K. J., & Fortman, M. (2004). *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. (T. Paul, K. J. Wirtz, & M. Fortman, Eds.) Stanford, California: Stanford University Press.
- Prime Minister of Australia. (2018, November 1). *Joint Statement between Australia and Papua New Guinea: Media Release*. Retrieved August 5, 2019, from Prime Minister of Australia: <https://www.pm.gov.au/media/joint-statement-between-australia-and-papua-new-guinea>
- Prime Minister of Australia. (2018, November 17). *Joint Statement of The Government of Australia, Japan and The United States: Media rRelease*. Retrieved August 13, 2019, from Prime Minister of Australia: <https://www.pm.gov.au/media/joint-statement-governments-australia-japan-and-united-states>
- Prygoda, M. (2017). The Role and Importance of Austrlia in the South Pacific Region. *Economic and Social Development: Book of Proceedings; Varazdin* (p. 54). Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency (VADEA). Retrieved April 9, 2019, from <https://search.proquest.com/docview/1883053951?accountid=62100>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Workpress.

Schiavon, J. A., & Dominguez, D. (2016). Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia (MIKTA): Middle, Regional, and Constructive Powers Providing Global Governance. *Asia & The Pacific Policy Studies*.

Syamsyuddin, & Damaianti, V. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa* (Cetakan Ketiga, Oktober 2009 ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

The Observatory of Economic Complexity. (2015, October 9). *Papua New Guinea*. Retrieved Juli 22, 2019, from The Observatory of Economic Complexity: <https://oec.world/en/>

The Observatory of Economic Complexity. (2017). *Australia: Exports*. Retrieved from The Observatory of Economic Complexity: <https://oec.world/en/profile/country/aus/#Exports>

The Observatory of Economic Complexity. (2017). *Australia: Imports*. Retrieved from The Observatory of Economic Complexity: <https://oec.world/en/profile/country/aus/#Imports>

The Observatory of Economic Complexity. (2017). *China Export*. Retrieved from The Observatory of Economic Complexity: <https://oec.world/en/profile/country/chn/#Exports>

The Observatory of Economic Complexity. (2017). *China: Import*. Retrieved from The Observatory of Economic Complexity: <https://oec.world/en/profile/country/chn/#Imports>

Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2013). *International Relations and World Politics*. New York: Pearson Education.

Walliman, N. (2011). *Research Method: The Basics*. Oxon: Routlage.

Wallis, J. (2014). Papua New Guinea New Opportunities and Declining Australian Influence? *Security Challenges, Security in Papua New Guinea, Vol 10. No.2* . Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/26467884>

- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. Boston: McGraw-Hill.
- Whiting, N., & Dziedzic, S. (2019, February 10). *Australia Ramps up Rivarly with China for Influence in the Pacific*. Retrieved August 7, 2019, from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2019-02-10/australia-ramps-up-its-rivalry-with-china-over-pacific-influence/10792848>
- Xinhua. (2018, November 14). China-Papua New Guinea Ties to Rapidly Grow: Ambassador. Port Moresby. Retrieved April 10, 2019, from <http://www.chinadaily.com.cn/a/201811/14/WS5bebb8d7a310eff303288a68.html>
- Yang, J. (2011, Desember 11). China in Fiji: Dispkacing Traditional Players? *Australian Journal of International Affairs*, 65, 306-309.
doi:<https://doi.org/10.1080/10357718.2011.563778>
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. Retrieved April 25, 2019, from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Metode+Penelitian+Kualitatif&ots=JwctGnTFcn&sig=IFtK3RB4hAfDpm6jr0anWBNDM80&redir_esc=y#v=snippet&q=kualitatif&f=false
- Zhang, D. (2017). China's Diplomacy in the Pacific: Interest, Means and Implications. *Security Challenges*, 13. Retrieved Mei 14, 2019, from <https://www.jstor.org/stable/26457717>
- Zhao, S., Binks, B., Kruger, H., Xia, C., & Stenekes, N. (2018, February). *What difference does labour choice make to farm productivity and profitability in the Australian horticulture industry?: A Comparison between seasonal wokrers and working holiday makers*. Retrieved August19 2019, from <http://documents.worldbank.org/curated/en/918681529495252580/pdf/Seasonal-Worker-Programme-Labor-Productivity-Study.pdf>